



**FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN
FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PANITIA
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUWANGI PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALADAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010
DALAM SUDUT PANDANG PERSEPSI PARTAI POLITIK**

*ORGANIZATIONAL FACTORS , RESOURCES , AND FINANCIAL PERFORMANCE
OF AFFECTING THE SUPERVISORY COMMITTEE ELECTIONS IN ELECTORAL
DISTRICT BANYUWANGI HEAD AND DEPUTY HEAD OF REGIONAL DISTRICT
VIEWPOINT IN THE PERCEPTION OF POLITICAL PARTIES IN PERSPECTIVE*

TESIS

Oleh :

Drs. Totok Hariyanto
NIM: 080920101021

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**



**FAKTOR-FAKTOR ORGANISASI, SUMBER DAYA, DAN
FINANSIAL YANG MEMPENGARUHI KINERJA PANITIA
PENGAWAS PEMILU KABUPATEN BANYUWANGI PADA
PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA
DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2010
DALAM SUDUT PANDANG PERSEPSI PARTAI POLITIK**

Tesis diserahkan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar

MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK

Oleh :

Drs. Totok Hariyanto
NIM: 080920101021

Pembimbing Tesis:

Pembimbing Utama : Dr.Sasongko, M.Si
Pembimbing Anggota : Drs. Boedijono, M.Si

**KONSENTRASI ADMINISTRASI DAN KEBIJAKAN PUBLIK
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS JEMBER
2016**

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis ini disetujui,
Tanggal:

Oleh

Pembimbing Utama

Dr.Sasongko, M.Si

Pembimbing Anggota

Drs. Boedijono, M.Si

Mengetahui/ Menyetujui
Universitas Jember Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Magister Administrasi Publik
Ketua Program Studi

Dr. Zarah Puspaningtyas, S.sos,SE.,M.Si

PENGESAHAN TESIS

Tesis berjudul :” *Faktor-Faktor Organisasi, Sumber Daya Manusia, Finansial yang Mempengaruhi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam Sudut Pandang Persepsi Partai Politik*” telah diuji dan disahkan oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember.

Hari : RABU
Tanggal : 29 Juni 2016
Tempat : Gedung Pasca Sarjana FISIP

Susunan Tim Pembimbing/ Penguji

Ketua

Dr. Edy Wahyudi, MM
NIP. 19750825 200212 1002

Anggota I

Dr. Sutomo, M.Si
NIP. 19650312 198103 1 003

Anggota III

Dr. Sasongko, M.Si
NIP. 19570407 198609 1 001

Anggota II

Dr. Anastasia Murdyastuti, M.Si
NIP. 19580510 198702 2 001

Anggota IV

Drs. Boedijono, M.Si
NIP. 19610331 198902 1 001

Dekan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Prof. Dr. Hary Yuswadi, M.A
NIP. 19520727 198103 1 003

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. TotokHariyanto

NIM :080920101012

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa karya ilmiah yang berjudul :” *Faktor-Faktor Organisasi, Sumber Daya Manusia, Finansial yang Mempengaruhi Kinerja Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2010 dalam Sudut Pandang Persepsi Partai Politik*”[“] ini adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan, saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini dan sanksi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku

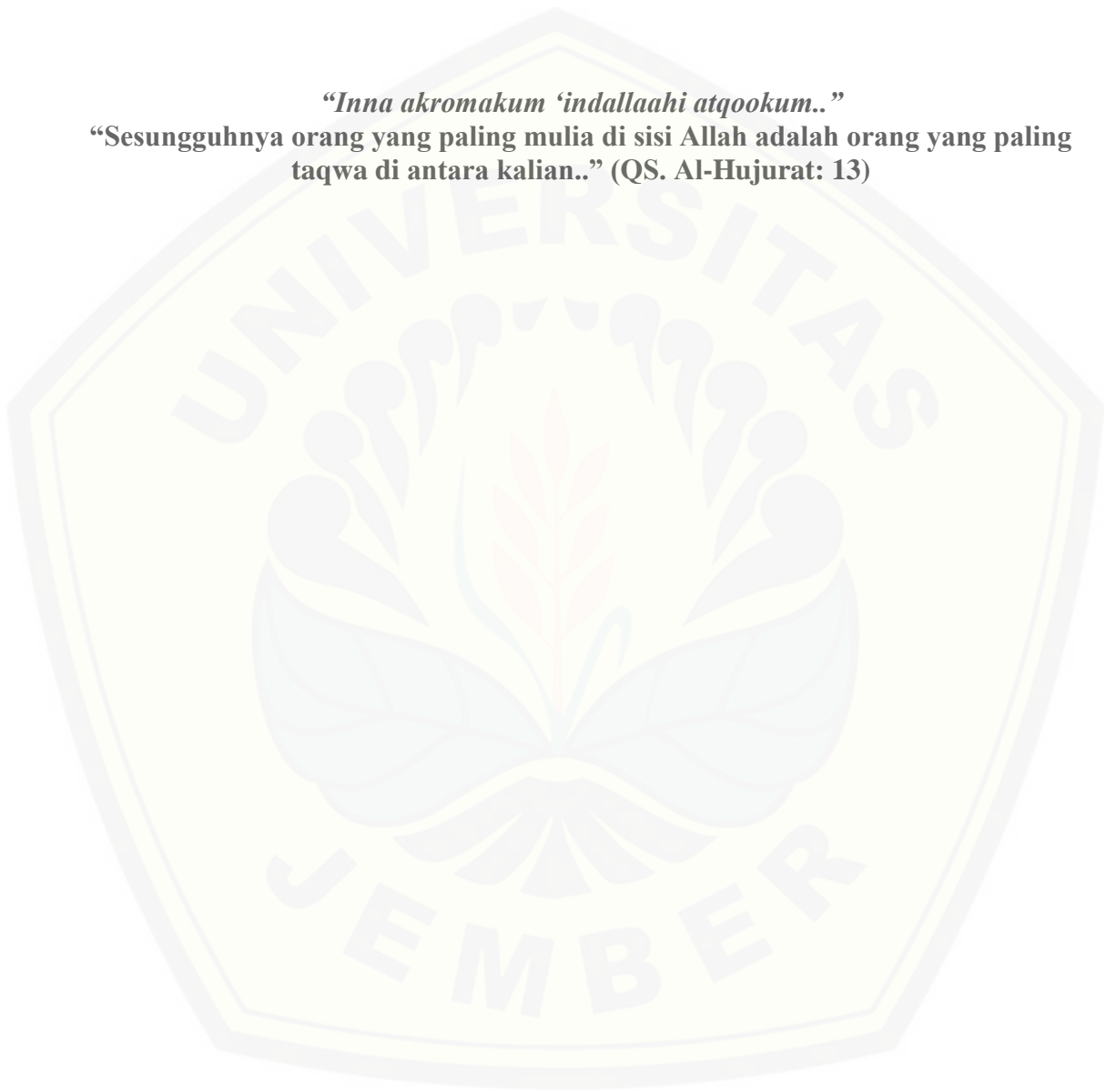
Jember, 29 Juni 2016
Yang membuat pernyataan,

Drs. Totok Hariyanto

HALAMAN MOTTO

*Sesungguhnya bersama kesukaran itu ada keringanan. Karena itu bila kau sudah selesai (mengerjakan yang lain). Dan berharaplah kepada Tuhanmu.
(Q.S Al Insyirah : 6-8)*

*“Inna akromakum ‘indallaahi atqookum..”
“Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling taqwa di antara kalian..” (QS. Al-Hujurat: 13)*



HALAMAN PERSEMBAHAN

Teriring dengan rasa syukur atas rahmad dan hidayah illahi Rabbi , semoga senantiasa menjadi barokah bagi kehidupan masyarakat.

*untuk istri dan anak-anakku,
Kakak-kakak dan kedua adik ku yang kusayangi,
Juga bagi sahabat-sahabat ku*



KATA PENGANTAR

Dengan senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas segala rahmat kasih dan karunia-Nya-lah penulis mampu menempuh dan menyelesaikan tesis program magister ilmu administrasi .

Rasa syukur dan terima kasih bahwa beberapa kendala dan hambatan yang dijumpai dalam penulisan tesis ini telah dapat diatasi baik , disamping itu penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan-kekurangan lainnya, maka dari itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak akan menjadi masukan yang sangat diharapkan..

Penulis menghaturkan banyak terima kasih, khususnya kepada :

1. Prof. Dr. Hary Yuswadi, MA, sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
2. Dr. Zarah Puspaningtyas, S.sos,SE.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Program Magister Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Jember
3. Dr.Sasongko, M.Si selaku Pembimbing Utama yang banyak memberikan ide, masukan, saran ilmiah dan bimbingan yang sangat berharga bagi penulis dan juga telah memacu penulis untuk dapat berkarya bagi kemajuan ilmu administrasi
4. Dsr. Boedijono, M.Si selaku Pembimbing Anggota yang banyak memberikan masukan, saran ilmiah dan bimbingan serta dorongan bagi penulis untuk terus maju dan mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam menyelesaikan tesis ini. teknis bagi terlaksananya penelitian.
5. Staf administrasi dan teman mahasiswa Program Magister Ilmu Administrasi yang telah memberikan dorongan semangat bagi penulis.

Penulis

Drs. Totok Hariyanto

ABSTRAK

Kebijakan terhadap Pemilu secara langsung yang ditetapkan di Indonesia dengan landasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004. sebagaimana jawaban atas semangat pemilu secara langsung di semua jenjang kepemimpinan. Dengan demikian kebijakan Pemilu secara langsung dipandang langkah strategis dalam rangka memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam rangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka Pemilu semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu

Pelaksanaan Pemilu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 meninggalkan beberapa catatan yang mengganggu proses demokratisasi tersebut, hal ini dipicu oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Surat Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilu Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang tidak meloloskan Pasangan Ratna Ani Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE.

Keputusan KPU Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut oleh Pasangan Ratna Ani Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian Bawaslu telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dengan rekomendasi sebagai berikut yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut; 1) Bawaslu memperkuat kembali rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslu Kab Banyuwangi; 2) KPU Kab Banyuwangi diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dalam proses pencalonan dan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE; 3) Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE sah dan memenuhi syarat sebagai pasangan calon calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Banyuwangi;

Meminta kepada KPU untuk dapat memerintahkan KPU Kab Banyuwangi dalam waktu yang sesegera mungkin agar menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu

Permasalahan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi Tahun 2010 tersebut menampakkan ketidakpaduan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU Kabupaten Banyuwangi dengan Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Ketidaksinkronan penyelenggara Pemilu Kabupaten Banyuwangi memberikan dampak buruk dalam persepsi partai politik peserta Pemilu Kabupaten Banyuwangi tahun 2010. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji factor organisasi, sumberdaya manusia dan finansial yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 dalam persepsi Partai Politik.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Yakni penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data

numeric(angka) sehingga akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti

Setelah dilakukan pengujian dan analisis data diperoleh hasil yang menyatakan bahwa hipotesis yang menyatakan terdapat pengaruh yang signifikan struktur organisasi terhadap kinerja Panwaslu karyawan terbukti kebenarannya atau H_1 diterima. Hal ini bisa disebabkan adanya aspek-aspek yang berkaitan dengan struktur organisasi telah mampu memberikan kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Hasil analisis jalur dan hipotesis menyatakan bahwa ada pengaruh yang signifikan Sumber Daya Manusia terhadap kinerja Panwaslu. Selanjutnya Finansial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Panwaslu. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian hipotesis. pengujian variabel finansial terhadap kinerja Panwaslu



ABSTRACT

Policy toward Election directly stipulated in Indonesia with a foundation of Law No. 32 of 2004 , as the answers to the spirit of direct elections at all levels of leadership . Thus policies directly Election deemed strategic steps in order to broaden , deepen , and improve the quality of democracy . it is also in line with the spirit of autonomy , namely the recognition of the aspirations and initiatives of local communities to determine their own fate . If the agenda of decentralization seen in the context of large democratization of the life of a nation, the Election should contribute greatly to it.

Implementation of Election Banyuwangi in 2010 left some notes that disrupt the democratization process , it is triggered by the Election Commission Banyuwangi regency , as Letter No. 137 / KPU -Kab / 014.329662 / V / 2010 regarding the assessment notices Election candidate pair Banyuwangi year 2010- 2015 does not pass pair Ratna Ani Lestari , MM and Pebdi Arisdiawan ,SE

Commission Decision of the Banyuwangi regency by Pair Ratna Ani Lestari, MM and Pebdi Arisdiawan reported to Panwaslu Banyuwangi. Reports received by Panwaslu Banyuwangi are followed by Panwaslu Banyuwangi in coordination with the Election Supervisory Body (Bawaslu), then Bawaslu has issued a Letter of Recommendation No. 433 / Bawaslu / VI / 2010 dated June 28, 2010 with the following recommendations, which essentially stated -things as follows; 1) Bawaslu reinforce the recommendation that has been set by the Election Supervisory Committee Banyuwangi Regency; 2) Tender Banyuwangi allegedly being in violation of Article 12, Article 13, Article 33, Article 34 of Commission Regulation No. 66 of 2009 in the nomination process and the verification of candidates Regent and Vice Regent of Regency Banyuwangi on behalf Ratna Ani Lestari, SE, MM and Pebdi Arisdiawan, SE; 3) The pair of candidates Regent and Vice Regent Banyuwangi regency in the name Ratna Ani Lestari, SE, MM and Pebdi Arisdiawan, SE legitimate and qualify as a candidate a candidate for Regent and Vice Regent Banyuwangi;

Asks the Commission to be able to instruct the Tender Banyuwangi in time as soon as possible in order to follow up and implement the recommendations that have been submitted by the Election Supervisory Body Problems nomination Banyuwangi Regent and Vice Regent of the Year 2010 appeared ketidakpaduan election organizers , in this case with the Election Supervisory Committee Banyuwangi Regency Banyuwangi. Realizing this , this study was conducted to determine the performance of Panwaslu Banyuwangi against Perception Political Party Election n Banyuwangi in 2010.

The study, using the deductive approach that aims to test the hypothesis of a study using the quantitative paradigm . The method used in this research is descriptive analysis method with quantitative approach . Ie research that emphasizes the analysis on data numeric (numbers) so they will know a significant relationship between the variables studied

After testing and data analysis results stating that the hypothesis that there is a significant effect of organizational structure on the performance of employees Panwaslu unsubstantiated or H1 accepted. This could be due to aspects relating to the organizational structure has been able to deliver the performance Panwaslu Banyuwangi.

The results of path analysis and hypothesis states that there is a significant influence on the performance of Human Resources Panwaslu . Financial Selanjutnya proved a significant effect on the performance of the Election Supervisory Committee . It diasarkan on hypothesis testing results .testing of financial variables on the performance of the Election Supervisory Committee



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	14
1.1 Latar Belakang Masalah.	14
1.2 Perumusan Masalah	29
1.3 Tujuan Penelitian	29
1.4 Manfaat Penelitian	29
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	31
2.1 Kinerja Organisasi	31
2.2 Pengertian Persepsi	55
2.3 Partai Politik Pemilu Kada Banyuwangi Tahun 2010	64
BAB III METODE PENELITIAN	70
3.1 Metode Penelitian yang Digunakan	70
3.2 Hipotesis	71
Populasi dan Sampel	75
Teknik Pengumpulan Data	78
Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis	80
BAB IV HASIL PENELITIAN	87
4.1 Hasil Penelitian	87
4.1.1 Deskriptif Penelitian	94
4.1.2 Uji Validitas dan Reliabilitas	96
4.1.3 Analisis Data	99
4.2 Pembahasan	106
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	112
5.1 KESIMPULAN	112
5.2 SARAN	112

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan paham demokrasi yang dianut dalam sistem kenegaraan Indonesia sebagai perwujudan kebijakan penempatan kedaulatan di tangan rakyat, dijabarkan dengan penjaminan hak asasi manusia sebagaimana amanat UUD 1945 secara bertahap dan terus menerus dikembangkan seiring dengan tuntutan masyarakat dan perkembangan zaman.

Penjaminan hak asasi manusia dalam tatanan kehidupan bernegara awalnya dimotori oleh John Locke (1623 – 1704) yang dikenal sebagai orang pertama sekaligus sebagai bapak pembangunan hak asasi manusia. Locke di tahun 1946, setelah Perang dunia II Merumuskan *natural right* sebagai hak alamiah manusia yang tidak boleh dilanggar konsep penjaminan hak asasi manusia itu kemudian dirujuk untuk dideklarasikan dalam *Article 21 Universal Declaration of Human Right*, (Deklarasi Universal Mengenai Hak-hak Asasi Manusia) oleh semua negara yang tergabung dalam PBB. (Budiardjo (1991 : 37-38).

Article 21 memuat penjaminan of equal acces to public servis in his country.3) The will of people shall be the basis of the authority of government ; this will shall be expressed in periodic and genuine election which shall be by universal and equal acces suffrage and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedure'' (Budiardjo,1991)

Kebijaksanaan Internasional tentang hak asasi manusia itu ditandaskan, bahwa setiap manusia sebagai warga Negara mendapatkan jaminan atas hak dalam penyelenggaraan pemerintah, sebagaimana *International Covenant on Civil and Political Right* (ICCPR) *Article 25* sebagai berikut :

“Every citizen shall have the right and the opportunity, without any of the distinctions mentioned in article 2 and without unreasonable restrictions : 1) To take part in the conduct of public affairs, directly or through freely chosen

representative ; 2) To vote and to be elected by genuine periodic elections which shall be by universal and equal suffrage and shall be held by secret ballot, guaranteeing the free expression of the will of the electors; 3) To have access, on general terms of equality, to public service in his country (Ibid, 1991).

Article 21 Universal Declaration of Human Right, dan Article 25 International Covenant on Civil and Political right (ICCPR), mengandung arti bahwa, hak atas warga Negara untuk turut serta dalam pemerintahan, yang dijawantahkan dalam hak warga Negara untuk memilih dan dipilih merupakan bagian dari hak konstitusional warga Negara sekaligus merupakan bagian dari hak asasi manusia secara universal.

Pelaksanaan hak dasar setiap orang (*natural right*) dalam negara yang berdaulat. Republik Indonesia sejak kelahirannya mengukuhkan diri sebagai negara demokratis dengan menempatkan rakyat sebagai pemenang kekuasaan tertinggi. Penegasan tentang kedaulatan di tangan rakyat eksplisit tertuang dalam pernyataan bahwa :”Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar (ayat2, Pasal 28 UUD NRI).

Negara Kesatuan Republik Indonesia menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dan member perlakuan kepada semua Negara secara adil, tidak diskriminatif dalam rangka kehiduoan berbangsa dan bernegara. proses demokratisasi tersebut disalurkan secara konstutional sebagaimana diatur oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Penguksahan sebagai Negara yang menganut system demokrasi diwujudkan dalam memberikan jaminan terhadap hak warga Negara untuk menyatakan kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat dalam kerangka Negara yang demokratis maka dilaksanakan pemilihan umu (ayat : 6 Pasal 22 E UUD 1945NRI)

Implementasi kebijakan sebagai kerangka dasar demokratis, maka dirumuskan sistem perundang-undang Indonesia yang memberkan landasan hukum terhadap pelaksanaan pemilihan umum yang dilaksanakan secara demokratis. Amanat UUD 1945

merumuskan bahwa pelaksanaan pemilihan umum di satu sisi sebagai wujud pelaksanaan proses demokratisasi sekaligus memberi tentang tahapan yang secara regular memberi peluang bagi terjadinya sirkulasi/pergantian kekuasaan Indonesia.

Sejalan dengan amandemen UUD dilakukan dalam rangka memberi penegasan terhadap sistem demokrasi, yang membuka ruang dan memberi keleluasaan pada kedaulatan rakyat lebih nyata diproyeksikan dengan cara memilih langsung presiden dan wakil presiden wakil rakyat yang akan duduk di lembaga lembaga perwakilan rakyat serta para wakil daerah yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan rakyat serta para wakil daerah yang akan duduk di lembaga perwakilan daerah

Amandemen UUD 1945 kota memberikan pedoman Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten / bahwa kepada daerah wakil kepala daerah disebutkan dipilih secara demokratis. Artinya dalam hal ini amandemen UUD 1945 memberikan ruang kewenangan pada DPRD dalam hal pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah baik di tingkat provinsi/kabupaten/kota

Landasan hukum bagi pelaksanaan kebijakan pemilihan kepala daerah dan wakil daerah yang dilakukan oleh DPRD sebagai wujud implementasi kebijakan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara demokratis kemudian dilaksanakan dengan dasra operasional UU Nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah.

Namun sayangnya dalam banyak praktik pemilihan kepala daerah yang dilakukan di bawah UU No.22 tahun 1999, Peran besar yang dimiliki DPRD tidak mampu menyerap aspirasi masyarakat secara optimal. Justru pemilihan diwarnai kuat oleh kecendrungan *oligarkhi* partai politik sehingga terjadi politisasi atas aspirasi public. Keadaan ini diperparah oleh kuatnya indikasi praktik politik uang dalam memuluskan seseorang untuk menjadi kepala daerah (Ramli, 2005 : 279-290).

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, hanya bertahan selama 5 tahun, karena pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh anggota DPRD dirasa belum memenuhi rasa demokratisasi sebagaimana tuntutan yang berkembang dan demi memperoleh dukungan (legitimasi) rakyat.

Kerangka kebijakan nasional dalam konteks pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dilandasi amandemen UUD, dihayati bahwa pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah propinsi, kabupaten, desa dan kota dipilih secara demokratis (Perubahan UUD 1945 II tanggal 18 Agustus 2000) harus diubah demi pemenuhan atas implementasi kebijakan terhadap pemilihan kepala daerah,

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemilihan kepala daerah oleh DPRD, diubah menjadi UU nomor 32 tahun 2004 yang direvisi hingga dua kali sampai tahun 2008 sebagaimana pedoman hukum terhadap pelaksanaan kebijakan demokrasi tentang pemilihan umum langsung di daerah.

Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah (selanjutnya disingkat PemiluKada), merupakan pengejawantahan kebijakan demokratisasi di daerah Indonesia dalam kerangka amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia yang terjadi di tahun 1999 hingga 2004. Model pemilihan kepala daerah langsung yang diatur dalam undang-undang ini menjadi salah satu capaian besar otonomi setelah era reformasi. Kemauan besar ini menandai pergeseran model demokrasi perwakilan ke demokrasi partisipatoris (demokrasi langsung) (Marijan, 2007). Kebijakan terhadap PemiluKada secara langsung yang ditetapkan di Indonesia dengan landasan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004, sebagaimana jawaban atas semangat pemilu secara langsung di semua jenjang kepemimpinan. Dengan demikian kebijakan PemiluKada secara langsung dipandang langkah strategis dalam rangka

memperluas, memperdalam, dan meningkatkan kualitas demokrasi. hal ini juga sejalan dengan semangat otonomi yaitu pengakuan terhadap aspirasi dan inisiatif masyarakat lokal untuk menentukan nasibnya sendiri. Jika agenda desentralisasi dilihat dalam rangka besar demokratisasi kehidupan bangsa, maka Pemilukada semestinya memberikan kontribusi yang besar terhadap hal itu (Syamsuddin, 2000)

Sejumlah argumentasi dan asumsi yang memperkuat pentingnya Pemilu Kada langsung *Pertama*, Pemilukada diperlukan untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas para elit politik lokal, termasuk kepala-kepaladaerah.*kedua*, pemilukada diperlukan untuk menciptakan stabilitas politik dan efektifitas pemerintah di tingkat lokal. *Ketiga*, Pemilukada akan memperkuat dan meningkatkan kualitas seleksi kepemimpinan nasional karena makin terbuka peluang bagi munculnya pemmpin-pemimpin nasional yang berasal dari bawah dan/atau daerah. Hal ini sejalan dengan salah satu tujuan desentralisasi dan otonomi daerah yaitu dalam rangka pelatihan dan kepemimpinan nasional, *keempat*, Pemilukada merupakan wadah dimana masyarakat lokal menyalurkan aspirasi politiknya untuk memilih pemimpin daerah sesuai dengan hati nuraninya masing-masing tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat (Ibid, 2000)

Pemilukada pada awalnya direspon oleh masyarakat dengan antusiasme yang tinggi. Antusiasme masyarakat itu berkaitan dengan terbukanya kesempatan bagi masyarakat memilih dan menentukan secara langsung kepala daerahnya. Ada deliberasi partisipasi warga dalam menentukan kepemimpinan di daerahnya. Antusiasme juga merupakan cerminan begitu besar harapan atau ekspektasi terhadap para kepala daerah hasil pemilu langsung, Hal itu tidak lepas dari akumulasi kekecewaan terhadap praktik pemerintahan lokal sebelum era pemilu langsung.

Kebijakan sistem demokrasi langsung memiliki kelebihan dibandingkan demokrasi perwakilan dalam hal : (1) Mengeliminir langgam politik oligarkis dalam

penentuan kepala daerah (kepala daerah dipilih oleh sekelompok orang). (2) Memperkuat pola hubungan *check and balances* dengan DPRD. (3) kepala daerah memiliki legitimasi yang kuat karena mendapatkan mandate langsung rakyat. (4) menghasilkan Kepala Daerah yang lebih akuntabel (5) Menghasilkan Kepala daerah yang lebih peka dan responsive terhadap tuntutan dan kebutuhan masyarakat.

Capaian terhadap pelaksanaan kebijakan demokratisasi di daerah lewat pemilu secara langsung sejak diundangkan Tahun 2004 hingga tahun 2008 telah mengalami dua kali revisi, yakni pertama melalui UU No. 8 Tahun 2005 dan UU No. 12 tahun 2008 tentang perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004. Kebijakan demokratisasi di daerah lebih diperluas dengan mespon Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007 tanggal 23 Juli 2007 tentang calon perseorangan. Selain itu, perkembangan memuat revisi dan pengaturan baru terhadap sejumlah ketentuan yang dipandang penting dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dan pemilihan umum kepala daerah.

Perubahan dilakukan yang terjadi dalam kebijakan demokratisasi di daerah berbagai ketentuan teknis, meliputi (1) Aturan batas usia calon bupati/wakil bupati dan walikota/ wakil walikota adalah 25 tahun sementara batas usia sebelumnya 30 tahun. (2) Kepala daerah *incumbent* yang maju dalam pemilu harus mengundurkan diri sejak pendaftaran yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali disertai dengan surat persetujuan pejabat berwenang (Mendagri) (3) pengisian kekosongan jabatan wakil kepala daerah (4) Pengalihan kewenangan memutuskan sengketa hasil pilkada dari Mahkamah Agung (MA) ke Mahkamah Konstitusi, (5) Revisi batas kemenangan calon terpilih kepala daerah dari 25% menjadi 30% (6) Pengajuan jadwal pemungutan suara yang dilakukan untuk mengantisipasi

persiapan agenda nasional Pemilu 2009. (7) Memutuskan kewenangan DPRD untuk membentuk panitia pengawas pemilu (UU Nomor 12 tahun 2008)

Kebijakan terhadap penyelenggaraan pemilihan umum, yang semula dilaksanakan berdasarkan kewenangan DPRD dalam hal membentuk panitia pengawas, serta penyelenggaraan pemilukada yang dilaksanakan oleh KPUD, Namun dalam hal ini KpUD secara hirarkis KPUD berhubungan structural dengan KPU. Dengan memutuskan hubungan hirarkis KPUD dengan KPU, maka KPUD hanya bersifat fungsional bukan structural yang hirarkis dengan KPU, sehingga KPUD mengalami problem serius dalam legitimasi dan independensi. (UU Nomor 32 tahun 2004)

Perumusan kebijakan nasional yang disempurnakan dengan jalan melakukan kompilasi dan rumusan yang komprehensif terhadap penyelenggaraan Pemilu. Maka kebijakan penyelenggaraan pemilihan umum secara substantif diatur dalam satu undang-undang terhadap semua pengaturan penyelenggaraan pemilu, meliputi : pemilu DPR, DPD, DPRD; pemilu presiden dan wakil presiden; serta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah. yang komprehensif (UU No. 22 Tahun 2007)

Kebijakan penetapan komisi pemilihan umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilukada dapat dilaksanakan dengan lebih baik, profesional, dan demokratis. Serta dilaksanakan lembaga independen.

Independensi KPU. Hal ini tercermin dari ketentuan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota Bersifat hirarkis Selanjutnya, RUU menegaskan bahwa, sesuai amanat UUD 1945, KPU bersifat nasional, tetap, dan mandiri. independensi KPU juga tercermin dalam hal dukungan sekretariat KPU sebagai *supporting system* yang bertanggung jawab kepada KPU.

Membentuk panitia pengawas pemilu yang sebelumnya dilakukan oleh DPRD, kemudian diubah dengan pembentukan organisasi panitia pengawas ekstern yang

independen, meliputi : (BAWASLU) di tingkat nasional yang bersifat tetap serta (PANWASLU) Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan. Pengawas Pemilu Lapangan, dan Pengawas Pemilu Luar Negeri (UU No. 22 Tahun 2007).

Proses pemilihan dilakukan secara terbuka dan memnuhi prinsip akuntabilitas public. Sehingga diharapkan penyelenggara pemilu merupakan orang-orang yang diakui kualitas, itegritas dan profesionalismenya oleh masyarakat luas. Dalam hal penjaminan terhadap kualitas, integritas, dan profesionalismen penyelenggara pemilu, maka dibentuklah Lembaga Penegak Kode Etik dan Dewan Kehormatan baik KPU maupun di Bawaslu untuk menjaga integritas dan profesionalist penyelenggarapemilu.

Setelah beberapa tahun pelaksanaan Pemilukada, Fitria Arsil melaporkan bahwa antusiasme masyarakat terhadap proses dan hasil pemilukada makin berkurang atau menurun. Hal ini bias dilihat antara lain dari menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada. Penurunan ini sejalan dengan menurunnya keyakinan masyarakat terhadap kemampuan kepala daerah hasil pemilukada langsung.selain itu, kondisi tersebut didorong oleh kekecewaan masyarakat terhadap partai politik yang kerap kali menyodorkan calon yang ridak sesuai dengan aspirasi masyarakat sebagai hasil proses pencalonan yang tidak demokratis, dugaan KKn dan politik uang serta kekecewaan masyrarakat terhadap kelalaian KPU dan para pengawasdalam penyelenggaraan pemilihan umu yang adil dan transparan (Arsil,2005:39-40)

Kekecewaan itu memunculkan respon mulai dari menguatnya apatisme di kalangan masyarakat,gejalaprotest voter yang meluas hingga golput, serta munculnya aspirasi calon perseorangan atau calon independen. selain itu, banyak pihak berpendapat bahwa pemilukada yang telah dilakukan justru tidak memperkuat makna dari dentralisasi yang sesungguhnya, yaitu memperkuat integrasi di tataran Negara kesatuan, sebab dalam banyak kasus penyelenggaraan pemilukada justru menjadi pemicu konflik horizontal.

Semangat pemilu pada secara langsung, berangkat dari suatu keyakinan bahwa demokratisasi di daerah merupakan prasyarat bagi demokrasi di tingkat nasional, pandangan bercorak fungsional ini didukung asumsi bahwa bila terjadi kualitas demokrasi di daerah otomatis bias diartikan sebagai perbaikan kualitas demokrasi di tingkat nasional (Smith, dalam Maridjan, 2010)

Penurunan kualitas demokrasi justru terjadi. Dalam hal ini kualitas penyelenggara Pemilu pada demokrasi. Dalam hal ini kualitas penyelenggara Pemilu pada diadukan sebagai penyebab. Sebagaimana dinyatakan Jerry Sumampaow, coordinator Komite Pemilihan Indonesia, bahwa pemilihan umum kepala daerah yang dilaksanakan sepanjang 2010 lebih buruk bila dibandingkan periode 2005, 91 Pemilu pada yang dilaksanakan bulan April hingga Juni tahun 2010 sebagian besar menuai masalah lebih besar dibanding 2005. Kinerja KPU Provinsi dan Kabupaten/kota dalam melaksanakan pemilu pada 2010 dinilai tidak mengalami peningkatan. Hal tersebut dibuktikan oleh DPT bermasalah dan kecurigaan penyimpangan dana penyelenggaraan. Bahkan sorotan di tujukan kepada lembaga penyelenggara, mengingat bahwa banyak kasus Pemilu pada di masa silam yang berhenti tanpa tindak lanjut berarti, menjadikan penyelenggara semakin percaya diri sampai mendapat predikat *superbody* sehingga tidak ada usaha perbaikan diri.

Tuduhan kemerosotan kualitas juga diarahkan kepada para kontestan Pemilu pada, sebab sebagian peserta, baik pasangancalon dari perseorangan dan pasangan calon dari parpol dan gabungan parpol dinilai tidak belajar dari masalah di masa silam, seiring dengan masih ada kontestan yang memalsukan ijazah bahkan pengerahan massa pemilihan dari luar wilayah pelaksanaan Pemilu pada (Detik News : 14 Juni 2010)

Sepanjang 2010, 244 Pemilu pada digelar di 7 provinsi, 202 Kabupaten, dan 35 kota. Sampai dengan pertengahan bulan Juli 2010, KPU Provinsi dan kabupaten / kota

sudah menyelesaikan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada 151 daerah. Pemilu pada yang sudah diselesaikan meliputi : 6 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur. sedangkan sisanya adalah pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten / kota yang tersebar di 25 provinsi lainnya.

Laporan KPU menyebutkan bahwa 151 Pemilu pada yang sudah diselesaikan melahirkan 87 gugatan ke Mahkamah Konstitusi (57,62%). dari 87 gugatana tersebut, 66 permohonan telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi dan 21 permohonan masih dalam proses persidangan. Bahwa dari 66 permohonan tersebut, hasil persidangan Mahkamah konstitusi menyatakan sebagai berikut :

Tabel 1.1. Hasil Persidangan Mahkamah Konstitusi

Deskripsi Permohonan	Jumlah Permohonan	Hasil Keputusan
Permohonan ditarik pemohon	3	
Permohonan ditolak seluruhnya	37	
Permohonan tidak dapat diterima	15	
Permohonan dikabulkan seluruhnya	2	Pengulangan seluruh tahapan
Permohonan dikabulkan sebagian	3	Pengulangan pemungutan suara
		Pengulangan penghitungan suara
Permohonan gugur	2	
Permohonan dengan keputusan sela	4	

Sumber Detik News, 14 Juni 2010

Permohonan yang dikabulkan sebagian yaitu Kota tebing Tinggi dengan harus melakukan pemungutan suara ulang, Kabupaten Konawe Selatan dengan melaksanakan pemungutan suara ulang, dan Kota Lamongan dengan melaksanakan Penghitungan ulang. Permohonan dengan vonis putusan sela adalah 1) kabupaten bangil dengan harus dilakukan pemungutan suara ulang 12 TPS di Kecamatan 2) Kabupaten Sintang dengan harus melakukan pemungutan suara ulang di TPS di 3 Kecamatan dan 23 TPS di 1 pemungutan suara ulang pada 67 TPS di 6 kecamatan 3) Kabupaten Gresik :pemungutan

suara ulang di 6 kecamatan dan 2 kelurahan selebihnya penghitungan suara ulang. Permohonan yang dikabulkan seluruhnya yaitu Kabupaten Mandailing Natal : pemungutan suara ulang, dan kota waringin barat : yang diharuskan menetapkan pasangan calon sebagai terpilih.

Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) menyatakan bahwa dalam penyelenggaraan PemiluKada tahun 2010 tercatat 1873 pelanggaran pemiluKada, terdiri dari 1474 pelanggaran administrasi pemilu, 211 pelanggaran pidana pemilu dan 54 pelanggaran kode etik, serta 98 sengketa pemilu kada. pelanggaran administrasi pemilu terjadi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih sebanyak 17 kasus, tahapan pencalonan sejumlah 33 kasus tahapan kampanye sebanyak 72 kasus, tahapan pemungutan suara sebanyak 1353 kasus. pelanggaran pidana pemilu sebanyak 221 kasus terjadi pada tahapan pemutakhirandaftar pemilih sebanyak 2 kasus, tahapan pemungutan dan penghitungan suara sejumlah 136 kasus. Adapun beberapa jenis pelanggaran lainnya seperti kode etik sebanyak 54 kasus. pelanggaran kode etik tersebut terbanyak dilakukan pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara sebanyak 28 kasus, dan pencalonan sebanyak 20 kasus. Sedangkan sengketa pemilu kada sebanyak 98 kasus, 79 kasus terjadipada tahapan penetapan hasil pemiluKada yang kemudian diputus oleh sidang mahkamah konstitusi (MK), 10 kasus sengketa Pemilu kada terjadi pada tahapan pemungutan suara, dan 8 kasus terjadi pada tahapan pencalonan, dan 1 kasus terjadi pada tahapan pemutakhiran daftar pemilih (BAWASLU, juli2010)

Menyikapi hal tersebut, KOMPAS memuat penilaian Mahmud MD, Yang mengungkap bahwa konflik vertikal dan horizontal acapkali terjadi dalam pemiluKada, menyebabkan energy bangsa bukan hanya terserap untuk pembelajaran demokrasi dan seleksi kepemimpinan tetapi juga untuk bertikai antara sesama anak bangsa yang tidak jarang membuat banyak jatuh korban. system pemiluKada ternyata belum mampu

menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dalam menggerakkan roda pembangunan dan kesejahteraan. hal ini terjadi karena system pemilihan sering menghasilkan kepala daerah yang tidak benar-benar memiliki kualitas dan kapabilitas sebagai pemimpin daerah. Mahmud MD juga menilai Pemilu langsung tidak menjamin kepemimpinan yang dipilih sesuai harapan rakyat. dalam catatannya sejak 2005, sudah ada 150 kepala daerah, mulai gubernur, walikota, hingga bupati tersangkut kasus hukum (KOMPAS, 19 juli 2010)

Ryaas Rasyid member pernyataan senada, menurutnya masyarakat dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Belum siap Menggelar Pemilu yg adil dan transparan. Hal ini dibuktikan bahwa hampir di semua daerah, pelaksanaan Pemilu harus karena KPU Provinsi dan Kabupaten / kota melaksanakannya secara tidak adil. Di sisi lain masyarakat dinilai belum siap menerima kekalahan. Pernyataan Ryaas dilanjutkan, bahwa sejak awal Pemilu langsung secara langsung dilaksanakan telah membuktikan ketidaksiapan penyelenggara, dalam hal ini KPU Provinsi dan Kabupaten / Kota serta masyarakat bahkan dalam hal hasil pemilu kada langsung ryaas menilai bahwa pemimpin yang dihasilkan tidak memberikan jaminan sebagaimana harapan rakyat. sebab dalam catatan ryaas, sejak 2005 disebut 150 Kepala kepala daerah, mulai gubernur, walikota, hingga bupati tersangkut kasus hukum (*politik indonesia*, 13 Agustus 2010). Menyimak dua pernyataan tersebut, maka penyelenggara pemilihan umum kepala daerah, ada dasarnya adalah pelaksanaan amanat kedaulatan rakyat, aspiratif, keterbukaan, keadilan, tanggung jawab, dan keniscayaan yang dilaksanakan dalam kerangka penjawatan prinsip demokratisasi.

Pemilihan umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil serta menjamin terwujudnya kedaulatan rakyat akan mampu dilaksanakan jika penyelenggara pemilihan



asas penyelenggara pemilu ; a) mandiri, b) jujur c), adil d) kepastian hukum e) tertib penyelenggara pemilu f) kepentingan umum g) keterbukaan h) proporsionalitas i) profesionalitas j) akuntabilitas k) efisiensi dan l) efektivitas.

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau biasa disingkat dengan Pemilukada adalah pemilihan umum untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi persyaratan. Sebelumnya, Pemilukada ini memiliki singkatan “Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”, namun sejak berlakunya Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, maka Pemilukada dimasukkan ke dalam ranah Pemilu, sehingga Pemilukada sekarang ini sudah resmi menjadi “Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”.

Penyelenggaraan Pemilukada ini mengacu pada Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya pada Bab IV Bagian Kedelapan tentang Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pasal 56 – 119. Kemudian Undang-undang No. 32 tahun 2004 tersebut diturunkan berupa peraturan teknis pelaksanaan Pemilukada yaitu Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Perpu ini mengalami perubahan tiga kali berturut-turut, hingga akhirnya menjadi Peraturan Pemerintah No.25 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua dan Peraturan Pemerintah No. 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 2005. Selanjutnya dilahirkan Undang-undang No. 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini khusus mengatur tentang mekanisme Pemilukada. Yang patut menjadi sorotan utama dari undang-undang ini adalah beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa hasil Pemilu dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi.

Pada tahun 2007, lahir undang-undang yang khusus mengatur tentang penyelenggara Pemilu, baik tentang KPU, KPU Daerah, maupun Pengawasan Pemilu untuk semua tingkatan, yaitu Undang-undang No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu. Jadi, terdapat dua ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemilu, yaitu Undang-undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang No. 27 tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu.

Telah disebutkan sebelumnya bahwa yang dipilih dalam Pemilu adalah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Kepala daerah adalah Kepala Pemerintahan Daerah yang dipilih secara demokratis. Demokratis di sini berarti, dipilih langsung oleh rakyat, DPRD yang notabene sebagai wakil rakyat tidak memiliki tugas dan wewenang untuk memilih kepala daerah. Hal ini berarti sebagai bentuk partisipasi rakyat secara langsung dalam menentukan pimpinannya. Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Daerah beserta perangkat daerah.

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat yang persyaratannya dan tata caranya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 32 tahun 2004). Pasangan calon dapat diajukan, baik oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sejumlah kursi tertentu dalam DPRD, dan atau memperoleh dukungan suara dalam Pemilu Legislatif dalam jumlah tertentu.

Selanjutnya, yang berwenang sebagai penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi, Kabupaten, dan Kota, hal ini sesuai dengan Undang-undang No. 32 tahun 2004. KPUD yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah KPUD sebagaimana yang dimaksud Undang-undang No. 12 tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD. Karena telah adanya ketentuan

tersebut, sehingga tidak diperlukan untuk membentuk dan menetapkan KPUD dan keanggotaan yang baru.

Berkaitan dengan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Penelitian sebelumnya menjelaskan terhadap pelaksanaan dari sudut pandang teori sejarah, seperti dilakukan oleh Pradana, Mu'ammara Ali. Dengan judul Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010. Penelitian ini memiliki tiga rumusan masalah yang dikaji yaitu: Bagaimana pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, Mengapa terjadi konflik dalam pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, dan Sejauh mana pengaruh konflik pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 pada masyarakat Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pelaksanaan pemilukada secara keseluruhan berjalan dengan aman dan lancar. KPU Kabupaten Banyuwangi menetapkan ada tiga calon yang dinyatakan lolos sebagai peserta pemilukada yaitu Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko, Jalal-Yusuf Nuris, dan Emilia Contesa-Zainuri. Pemilukada ini menghasilkan kemenangan pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko dengan perolehan suara 372.149, sedangkan Jalal-Yusuf Nuris memperoleh 235.027 suara, dan Emilia Contesa-Zainuri memperoleh 130.794 suara. Keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi yang tidak meloloskan Ratna berujung konflik. Kubu Ratna menggugat keputusan KPU Kabupaten Banyuwangi. Gugatan Ratna di PTUN hingga ke MA dan MK. Hasilnya semua gugatan Ratna tidak dikabulkan pengadilan. Konflik yang terjadi antara Ratna dan KPU Kabupaten Banyuwangi berdampak cukup besar pada proses pemilukada.

Pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 meninggalkan beberapa catatan yang mengganggu proses demokratisasi tersebut, hal ini dipicu oleh KPU Daerah Kabupaten Banyuwangi, sebagaimana Surat Nomor: 137/KPU-Kab/014.329662/V/2010 perihal pemberitahuan penetapan pasangan calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010-2015 yang tidak meloloskan Pasangan Ratna Ani

Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan,SE.

Keputusan KPU Daerah Kabupaten Banyuwangi tersebut oleh Pasangan Ratna Ani Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Laporan yang diterima oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi tersebut ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dengan berkoordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), kemudian Bawaslu telah mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010 dengan rekomendasi sebagai berikut yang pada pokoknya menyatakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bawaslu memperkuat kembali rekomendasi yang telah ditetapkan oleh Panwaslu KabBanyuwangi;
2. KPU Kab Banyuwangi diduga kuat telah melakukan pelanggaran terhadap Pasal 12, Pasal 13, Pasal 33, Pasal 34 Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 dalam proses pencalonan dan verifikasi calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan,SE;
3. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kab Banyuwangi atas nama Ratna Ani Lestari, SE, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE sah dan memenuhi syarat sebagai pasangan calon calon Bupati dan Wakil Bupati KabupatenBanyuwangi;
4. Meminta kepada KPU untuk dapat memerintahkan KPU Kab Banyuwangi dalam waktu yang sesegera mungkin agar menindaklanjuti dan melaksanakan rekomendasi yang telah disampaikan olehBawaslu

KPU Kabupaten Banyuwangi ternyata tidak melaksanakan rekomendasi tersebut, dan Pasangan Ratna Ani Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE. tidak mendapatkan tempat sebagai calon Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010.

Ketidaklolosan Pasangan Ratna Ani Lestari, MM dan Pebdi Arisdiawan, SE dalam Pemilukada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 satu sisi menunjukkan ketudakharmonisan hubungan penyelenggara Pemilu, yakni KPU dan Panwaslu Kabupaten Banyuwangi. Dalam sudut pandang Panwaslu Kabupaten Banyuwangi, persoalan ketidaklolosan pasangan tersebut semata-mata didasarkan atas ketidakcukupan

persyaratan dukungan sebagaimana alasan yang diberikan KPU Kabupaten Banyuwangi, namun dalam sudut pandang KPU Kabupaten Banyuwangi mungkin didasarkan atas status Ratna Ani Lestari, MM yang telah ditetapkan sebagai Tersangka dalam kasus korupsi pembebasan lahan Lapangan Terbang Blimbingsari sebesar Rp19,76 M yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Banyuwangi tahun 2010.

Mengingat kasus pencalonan Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010 bersentuhan langsung dengan Partai Politik peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi, maka ketidakharmonisan penyelenggara Pemilukada menuntut penjelasan terutama terhadap kinerja masing-masing penyelenggara Pemilukada tersebut. Menyadari hal itu, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Faktor-faktor Organisasi, Sumber Daya dan Finansial yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dalam sudut pandang Persepsi Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010.

1.2 Perumusan Masalah

Masalah penelitian dirumuskan untuk menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan Faktor-faktor Organisasi, Sumber Daya dan Finansial yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dalam sudut pandang Persepsi Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010.. Dengan demikian permasalahan dideskripsikan sebagai berikut : Seberapa Tinggi Faktorfaktor Organisasi, Sumber Daya dan Finansial yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dalam sudut pandang Persepsi Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010..?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

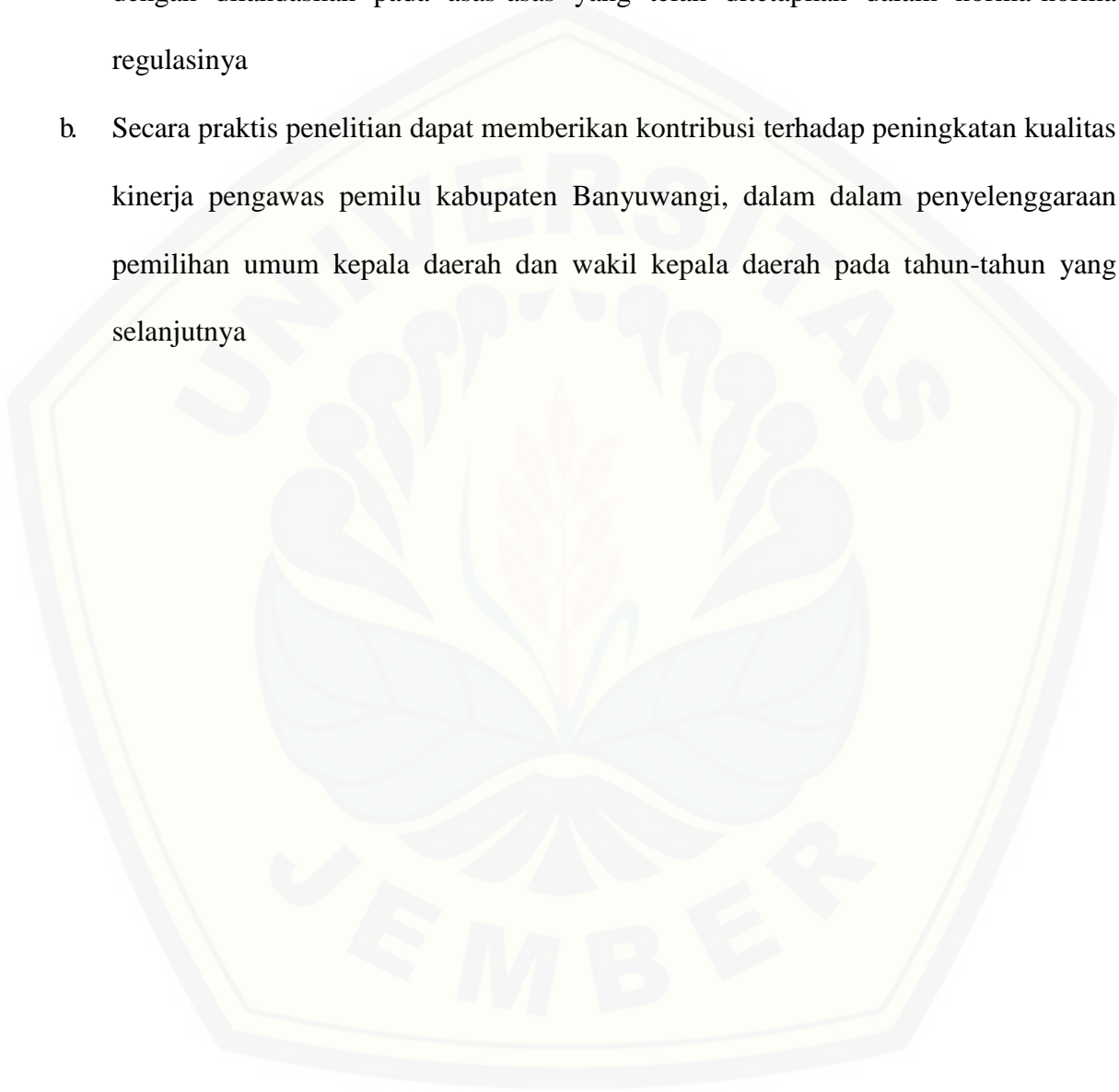
1.3.1. Tujuan Penelitian

Penelitian difokuskan untuk “Mendeskripsikan Faktor faktor Organisasi, Sumber Daya dan Finansial yang mempengaruhi kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi dalam sudut pandang Persepsi Partai Politik Peserta Pemilukada Kabupaten Banyuwangi tahun 2010”..

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian difokuskan antara lain :

- a. Secara teoritis diharapkan memberikan manfaat berupa kontribusi pemikiran terhadap pengembangan kelembagaan organisasi public atau birokrasi pemerintahan khususnya kinerja organisasi dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan dengan dilandaskan pada asas-asas yang telah ditetapkan dalam norma-norma regulasinya
- b. Secara praktis penelitian dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas kinerja pengawas pemilu kabupaten Banyuwangi, dalam penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun-tahun yang selanjutnya



BAB 2.
TINJAUAN PUSTAKA

Undang – undang Nomor 22 Tahun 2007 menyatakan bahwa Panwaslu Kabupaten Banyuwangi adalah lembaga Negara yang bertindak atas fungsi, tugas dan kewenangan dalam melaksanakan pengawasan pemilihan umum. Untuk melaksanakan pemilihan umum baik pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPD, DPR, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten / Kota, maupun pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah dan wakil kepala daerah, maka kinerja Panwaslu menjadi faktor penentu dalam keberhasilan pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut. Mengkaji kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi maka konsep yang dianggap relevan untuk menelaah focus masalah adalah konsep kinerja organisasi, pengukuran kinerja organisasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi.

2.1 Kinerja Organisasi

Sebelum membahas kinerja organisasi, Terlebih dahulu pembahasan difokuskan tentang masalah organisasi. Organisasi merupakan suatu bentuk kerjasama sekelompok manusia atau orang di bidang tertentu mencapai suatu tujuan tertentu (Etzioni, 1984). Lebih lanjut Etzioni menjelaskan bahwa organisasi memiliki ciri-ciri : a) adanya pembagian kerja, kekuasaan dan tanggung jawab berkomunikasi, pembagian yang direncanakan untuk mempertinggi realisasi tujuan khusus. b) adanya satu atau lebih pusat kekuasaan yang mengawasi penyelenggaraan usaha-usaha bersama dalam Organisasi dan pengawasan. Usaha tersebut untuk mencapai tujuan organisasi, pusat kekuasaan ini juga harus menunjukkan secara terus menerus pelaksanaan organisasi dan menata kembali strukturnya untuk meningkatkan efisiensi. c) pengaturan personil

misalnya orang-orang yang bekerja secara tidak memuaskan dapat dipindahkan dan kemudian mengangkat pegawai lain untuk melaksanakan tugasnya.

Sedangkan Henry (1988) mengatakan bahwa organisasi merupakan suatu koneksitas manusia yang kompleks dan dibentuk untuk tujuan tertentu, dimana hubungan antara anggotanya bersifat resmi (*impersonal*), ditandai oleh aktivitas kerjasama, terintegritas dalam lingkungan yang lebih luas, memberikan pelayanan dan produk tertentu dan tanggung jawab kepada hubungan dengan lingkungannya.

Sesuai dengan konsep di atas, maka dalam konteks penelitian ini organisasi yang dimaksud adalah organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi yang merupakan unsure penyelenggara pemilihan umum di daerah

Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi mempunyai tugas pokok dan fungsi yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan, sebagaimana telah disebutkan dalam latar belakang. Bagi setiap organisasi, Penilaian terhadap kinerja merupakan suatu kegiatan yang sangat penting. Penilaian tersebut digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu (Keban, 1995).

Definisi tentang kinerja organisasi dikemukakan beberapa ahli, berikut penulis kemukakan sebagai berikut. Jackson dan Morgan (1978) mengemukakan bahwa kinerja pada umumnya menunjukkan tingkat tujuan yang telah ditentukan sebelumnya, yang hendak dicapai. Rue and Byar (1981) dalam (Keban, 1995) menyebutkan bahwa kinerja (*performance*) didefinisikan sebagai tingkat pencapaian hasil atau "*the degree of accomplishment*" atau kinerja merupakan tingkat pencapaian tujuan organisasi secara berkeeseimbangan.

Atmosudirdjo (1997) mengatakan bahwa bahwa kinerja juga dapat berarti prestasi kerja, Prestasi penyelenggaraan sesuatu (*performance how well you do a piece of work or activity*). Faustino (1995) memberi batasan mengenai performansi adalah suatu cara mengukur kontribusi – kontribusi dari individu-individu anggota organisasi kepada organisasinya. Selain itu Bernaid dan Russel sebagaimana dikutip Jones (1991) lebih rinci memberikan batasan mengenai kinerja yakni dampak yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan tertentu atau kegiatan selama satu periodewaktu tertentu. Menurut Peter Jennerge (dalam Sterrs, 1985) pengertian kinerja organisasi adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh pelaksanaan tugas dapat dijalankan secara actual dan misi organisasi tercapai. Selanjutnya Pamungkas (2000) menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan suatu hasil yang diperoleh engan aktivitas yang dicapai dengan suatu unjukkerja.

Dengan demikian dari konsep yang ditawarkan tersebut dapat dipahami bahwa kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukkan seberapa jauh tingkat kemampuan pelaksanaan tugas-tugas organisasi dalam rangka pencapaiantujuan. Dalam konteks penelitian ini, maka pengertian kinerja merupakan tingkat kemampuan aparat Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakantugas pokok dan fungsi sesuai dengan visi dan misinya.

2.1.1 Pengukuran Tentang Kinerja Organisasi

Cakupan dan cara mengukur indicator kerja sangat menentukan apakah suatu organisasi public dapat dikatakan berhasil atau tidak (Keban, 1995). Lebih lanjut Keban menjelaskan bahwa ketepatan pengukuran kinerja jauh Sangat menentukan penilaian akhir kinerja.

Whittaker (1993) menyebutkan bahwa pengukuran kinerja merupakan suatu alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas (Dalam LAN, 2000). Pengukuran Kinerja mempunyai makna ganda, yaitu pengukuran kinerja sendiri dan evaluasi kinerja, dimana untuk melaksanakan kedua hal tersebut terlebih dahulu harus ditentukan tujuan dari suatu program secara jelas. Pengukuran kinerja merupakan jembatan antara perencanaan strategis dengan akuntabilitas, sehingga suatu pemerintah daerah dapat dikatakan berhasil jika terdapat bukti-bukti atau indikator-indikator atau ukuran-ukuran capaian yang mengarah pada pencapaian misi. Teknik dan metode yang digunakan dalam menganalisis kinerja kegiatan, yang pertama dilakukan adalah dengan melihat sejauh mana adanya kesesuaian antara program dan kegiatannya. Program dan kegiatan merupakan program dan kegiatan sebagaimana yang terutang dalam perencanaan strategis pemerintah daerah yang bersangkutan.

Donald dan Lawton (dalam Keban, 1995) mengatakan bahwa penilaian kinerja organisasi dapat digunakan sebagai ukuran keberhasilan suatu organisasi dalam kurun waktu tertentu dan penilaian tersebut juga dapat dijadikan input bagi perbaikan dan peningkatan kinerja organisasi.

Sementara itu, Bernadin (1998) mengatakan bahwa system penilaian kinerja harus disusun dan diimplementasikan dengan suatu 1) prosedur formal standar; yang 2) berbaisi pada analisis jabatan dan 3) hasilnya didokumentasikan dengan baik. 4) penilaian yang dimiliki kapasitas dan kompetensi yang dipertanggungjawabkan.

Meskipun penilaian kinerja telah berkembang dengan pesat, akan tetapi penggunaan penilaian kinerja dalam organisasi public belum berkembang sebagaimana yang telah terjadi dalam sector swasta. Berdasarkan data empiris menunjukkan bahwa penilaian terhadap kinerja diorganisasi public belum merupakan tradisi populer (Keban, 1995) dan bahkan terhadap banyak perbedaan pendapat mengenai kriteria kinerja

pelayanan public (Dwiyanto,1995). Perbedaan pendapat tersebut menurut Dwiyanto (1995) disebabkan tujuan dan misi organisasi public seringkali bukan hanya sangat kabur akan tetapi juga bersifat multi dimensional.

LAN(1999) mendeskripsikan bahwa pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode Akuntabilitas Kinerja Instansi Kinerja (AKIP). Metode ini menggunakan indikator kinerja sebagai dasar penetapan capaian kinerja (PK).Penetapan indikator didasarkan pada masukan (*Inputs*), Keluaran (*output*), Hasil (*outcome*) manfaat (*Benefit*) dan dampak (*impact*). Sependapat dengan hal tersebut, Mardiasmo (2001) mengatakan bahwa dalam mengukur kinerja suatu program, tujuan dari masing-masing program harus disertai dengan indikator-indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kemajuan dalam pencapaian tujuan tersebut. indikator kinerja didefinisikan sebagai ukuran kuantitatif dan / atau kealitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan diukur dan dihitungserta digunakan sebagai dasar untuk menilai apapun melihat tingkat kinerja suatu program yang dijalankan unit kerja.Dengan demikian tanpa indikator kinerja, sulit bagi kita untuk menilai kinerja (keberhasilan atau kegagalan) Kebijakan/ program / kegiatan dan pada akhirnya kinerja instansi / unit kerja yang melaksanakan.

Lebih lanjut Mardiasmo menjelaskan bahwa pada umumnya system ukuran kinerja dipecah dalam 5(lima) kategori sebagai berikut

- a. Indikator *Input*, Mengukur sumberdaya yang diinvestasikan dalam suatu proses,program,maupun aktivitas untuk menghasilkan keluaran(*Output* maupun *Outcome*) Indikator ini mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), sumberdaya manusia, informasi Kebijakan/peraturan Perundang-undang dan sebagainya h= yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau

distribusi sumberdaya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

- b. Indikator *Output*, adalah suatu yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan yang dapat berupa fisik dan / atau non fisik. Indikator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari suatu kegiatan. Dengan membandingkan output yang direncanakan dan yang betul-betul terealisasi, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan landasaan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefinisi dengan baik dan terukur. Oleh sebab itu, indicator output harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
- c. Indikator *outcome*, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya *Output* (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam banyak hal, informasi yang diperlukan untuk mengukur *Outcome* seringkali tidak lengkap dan tidak mudah diperoleh. oleh karena itu, setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur outcome dari output suatu kegiatan. Pengukuran indicator outcome seringkali rancu dengan pengukuran indicator output. contohnya, penghitungan jumlah bibit unggul yang dihasilkan oleh sesuatu kegiatan merupakan tolak ukur output. akan tetapi perhitungan besar produksi perhektar yang dihasilkan bibit-bibit unggul tersebut merupakan indicator outcome.
- d. Indikator *benefit*, menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indicator outcome. *Benefit* (manfaat) tersebut pada umumnya tidak segera tampak. Setelah beberapa waktu kemudian, yaitu dalam jangka menengah atau jangka panjang dari benefitnya tampak, Indikator *benefit* menunjukkan hal-hal diharapkan untuk dicapai bila output dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal.

- e. Indikator *impact* memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari *benefit* yang diperoleh. seperti halnya indicator benefit indicator impact juga baru dapat diketahui dalam jangka waktu menengah atau jangka panjang. indicator impact menunjukkan dasar pemikiran dilaksanannya kegiatan yang menggambarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional.

Selim dan Woodward (dalam Keban,1995) menatakan bahwa kinerja dapat diukur dari beberapa indicator antara lain *Workload/demand, economy, efficiency, effectiveness,* dan *equality*. Lenvine (1990) (dalam Dwiyanto,1995) mengusulkan tiga konsep yang bisa dipergunakan untuk mengukur kinerja birokrasi public / organisasi non bisnis yaitu : *Responsiveness, responsibility dan accountability* yang dimaksud *responsivitas (responsiveness)* disini adalah kemampuan organisasi untuk mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Semakin banyak kebutuhan dan keinginan masyarakat yang deprogram dan dijalankan oleh organisasi public maka kinerja organisasi tersebut dinilai semakin baik. *Responsibilitas (responsibility)* disini menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi public ini dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi baik yang implicit atau eksplisit.

Semakin kejelasan organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan dan kebijakan organisasi, maka kinerjanya dinilai semakin baik. Akuntabilitas public menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk menunjukkan pada seberapa besar kebijakan dan kegiatan organisasi public tunduk pada para pejabat politik yang dipilih oleh rakyat (*elected officials*). Asumsinya disini adalah bahwa para pejabat politik tersebut, karena dipilih oleh rakyat, Dalam konteks ini kinerja organisasi public dinilai baik apabila seluruhnya atau setidaknya sebagian besar kegiatannya didasarkan pada upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan para wakil rakyat. semakin banyak tindak lanjut

organisasi atas harapan dan aspirasi pejabat politik, maka kinerja organisasi tersebut itu dinilai makin banyak.

Dalam konteks penelitian ini maka konsep yang akan digunakan untuk mengukur kinerja organisasi adalah konsep yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi dan berdasarkan data empiris di lapangan (*actionable causes*), yaitu akuntabilitas, Responsibilitas dan responsivitas sebagaimana pendapat Lenvine (Dwiyanto, 1995).

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi

Dalam menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, Penulis mencoba mengacu pada beberapa kerangka teori dan model yang dikembangkan oleh beberapa ahli. Dengan mengacu pada kerangka teori yang digunakan para ahli pada penelitian kinerja organisasi, diharapkan kerangka teori tersebut dapat dijadikan pedoman dalam melihat fenomena yang terjadi dalam kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, walaupun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kenyataan di lapangan (*actionable causes*).

Beberapa pandangan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi publik, yang dipengaruhi oleh ruang dan waktu, dapat ditemui dari berbagai kepustakaan yang berusaha menggambarkan kinerja organisasi publik. Suatu organisasi, terlepas dari bagaimana bentuknya organisasi tersebut, apapun tujuan yang akan dicapai, selalu mengharapkan sasaran/target yang telah ditetapkan akan dapat tercapai semaksimal mungkin. Untuk mencapai target tersebut, banyak faktor yang dapat mempengaruhi.

Muljarto (1977), menyatakan bahwa organisasi bukanlah system yang tertutup (*close system*) melainkan organisasi tersebut akan selalu dipaksa untuk member tanggapan atas rangsangan yang berasal dari lingkungannya. Pengaruh lingkungan dapat

dilihat dari dua segi : *pertama*, lingkungan external yang umumnya menggambarkan kekuatan yang berada di luar organisasi seperti faktor politik, ekonomidan social, *kedua* adalah lingkungan internal yaitu faktor-faktor dalam organisasi yang menciptakan iklim organisasi dimana berfungsinya kegiatan mencapai tujuan.

Sejalan dengan pendapat tersebut, Higgins (1985) dan Salusu (1996) menyatakan bahwa ada dua kondisi yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi yaitu konsep yang dipakai untuk menunjukkan pada kondisi lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor strategis yaitu kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan internal yang bersifat positif, yang kemungkinan organisasi memiliki keuntungan strategis dalam mencapai sasarannya sedangkan tidak dapat mencapai sasarannya. Kedua faktor ini saling berkaitan dan saling mempengaruhi. Faktor yang perlu diperhitungkan dalam melihat kemampuan internal organisasi antara lain : struktur organisasi, sumberdaya baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang dimiliki, integritas seluruh karyawan dan integritas kepemimpinan. Kondisi yang kedua adalah lingkungan eksternal yang terdiri dari dua faktor strategis yaitu peluang dan ancaman atau tantangan. Peluang sebagai situasi dan faktor-faktor eksternal yang membantu organisasi mencapai atau bahkan bisa melampaui pencapaian sasarannya sedangkan ancaman adalah faktor-faktor eksternal yang menyebabkan organisasi tidak dapat mencapai sasarannya dalam mengamati lingkungan eksternal ada beberapa sector yang peka secara strategis artinya bisa menciptakan peluang, atau sebaliknya merupakan ancaman, Perkembangan teknologi misalnya keuntungan atau kerugian bagi organisasi. Tetapi yang jelas, Menurut William Cohed (David, 1989) ialah bahwa peluang dan ancaman hadir pada setiap saat dan dan senantiasa melampaui sumberdaya yang tersedia. Artinya, Kekuatan yang dimiliki organisasi selalu berada dalam posisi lebih lemah dalam menanggulangi ancaman, bahkan dalam mengejar peluang sekalipun.

Sementara itu Streers (1980) Menyatakan bahwa faktor-faktor yang menyokong keberhasilan akhir suatu organisasi dapat ditemukan dalam empat kelompok umum.

Keempat kelompok umum tersebut adalah :

- a. Karakteristik organisasi terdiri dari struktur dan teknologi organisasi. yang dimaksudkan dengan struktur adalah hubungan yang relative tetap sifatnya seperti dijumpai dalam organisasi, sehubungan dengan susunan sumberdaya manusia. Struktur adalah cara unik suatu organisasi menyusun orang-orangnya untuk menciptakan sebuah organisasi. Dengan demikian pengertian struktur meliputi faktor-faktor seperti luasnya desentralisnya pengendalian, jumlah spesialisasi pekerjaan, cakupan perumusan interaksi antar pribadi, dan seterusnya. Jadi, Keputusan mengenai cara bagaimana orang-orang akan dikelompokkan untuk menyelesaikan pekerjaan. dilain pihak, yang dimaksud dengan teknologi adalah mekanisme suatu organisasi untuk mengubah masukan mentah menjadi keluaran jadi. teknologi dapat memiliki berbagai bentuk, termasuk variasi-variasi dalam proses mekanis yang yang digunakan dalam produksi, variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai digunakan dalam produksi variasi dalam bahan yang digunakan dan variasi dalam pengetahuan teknis yang dipakai untuk kegiatan sasaran.
- b. Karakteristik lingkungan, mencakup dua aspek yaitu pertama adalah lingkungan ekstern m yaitu semua kekuatan yang timbul di luar batas-batas organisasi dan mempengaruhi keputusan serta tindakan dialam organisasi (contoh : kondisi ekonomi dan pasar, Peraturan pemerintah), yang kedua, adalah lingkungan intern, yang dikenal sebagai iklim organisasi meliputi macam-macam atribut lingkungan kerja (contohnya: pekerja sntris, orientasi pada prestasi) yang sebelumnya telah ditunjukkan mempunyai hubungan dengan segi-segi tertentu dari efektivitas,

khususnya atribut-atribut yang diukur pada tingkat individual (contoh : sikap kerja, prestasi).

- c. Karakteristik pekerja, perhatian harus diberikan kepada perbedaan individual antara para pekerja dalam hubungannya dengan efektivitas. pekerja yang berlainan mempunyai pandangan, tujuan, kebutuhan dan kemampuan yang berbeda-beda. variasi sifat manusia ini sering menyebabkan perilaku orang berbeda satu sama lain, walaupun mereka ditempat di satu lingkungan kerjayang sama. lagi pula perbedaan-perbedaan individual ini dapat mempunyai pengaruh yang langsung terhadap dua proses yang penting, yang dapat berpengaruh nyata terhadap efektivitas.yaitu rasa keterkaitan terhadap organisasi atau jangkauan identifikasi para pekerjadengan majikannya dan prestasti efektivitas adalahmustahil.
- d. Kebijakan dan praktek manajemen peranan manajemen dalam prestasi organisasi, meliputi variasi gaya, kebijakan dan praktek kepemimpinan dapat memperhatikan atau merintanginya pencapaian tujuan. Peran manajer memainkan peran sentral dalam keberhasilan suatu perusahaan melalui perencanaan kegiatan yang ditunjukkan kearah sasaran. Adalah kewajiban mereka untuk menjamin bahwa struktur organisasi konsisten dengan dan menguntungkan untuk teknologi dan lingkungan yang ada. Lagipula adalah tanggung jawab mereka untuk menetapkan suatu system imbalanyang pantas sehingga para pekerja dapat memuaskan kebutuhan dan tujuan pribadinya sambil sambil mengejar sasaran organisasi. Dengan makin rumitnya proses teknologi dan makin rumitn dan kejamnya keadaan lingkungan, peranan manajemen dalam mengkoordinasi orang dan proses demi keberhasilan organisasi tidak hanya bertambah sulit, tapi juga menjadi semakin pentingartinya.

Sementara itu Joedono (1974) mengatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah organisasi antara lain meliputi : 1) faktor kualitas SDM 2) struktur organisasi 3) teknologi 4) pimpinan dan masyarakat 5) bentuk kepemimpinan.

Menurut Bryson (1995) faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi bukan semata bersifat internal seperti input proses manajemen tetapi juga lingkungan eksternal ini sering kali berada diluar jangkauan intervensi organisasi, namun mengingat keterpengaruhnya yang cukup signifikan terhadap kinerja organisasi, maka kiranya faktor lingkungan eksternal tetap harus menjadi perhatian dalam upaya peningkatan kinerja suatu organisasi. Lebih lanjut Bryson menyatakan bahwa perkembangan di lingkungan internal dan eksternal, tentunya kembali pada spesifikasi permasalahan yang di hadapinya, apakah permasalahan itu pada aspek input atau aspek proses manajemennya, yang kemudian pada sisi mana dari aspek yang paling diprioritaskan kembali untuk di benahi, baru kemudian dapat ditentukan upaya-upaya relevan yang dapat dilakukan guna meningkatkan kinerja organisasi tersebut.

Bryson menjelaskan bahwa untuk lebih meningkatkan kinerja dinas tersebut secara teoritis menyeluruh aspek-aspek yang berpengaruh terhadap kinerja, Pertama aspek-aspek input atau sumberdaya-sumber dayanya (*resources*) antara lain : (1) Pengawasan sumberdaya manusia (2) anggaran (3) sarana dan prasarana (4) informasi (5) Budaya organisasi. kedua hal yang berkaitan dengan proses manajemen dalam organisasi seperti : (1) proses perencanaan (2) proses pengorganisasian (3) Proses pelaksanaan (4) proses penganggaran (5) Proses pengawasan (6) Proses evaluasi dan sebagainya. Setiap aspek tersebut mempunyai potensi yang sama untuk muncul sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kerja dinas, baik berpengaruh dalam arti negative (menjadikan lemahnya kinerja) maupun positif (meningkatkan kinerja). Disamping faktor inteenal tersebut, perlu juga diperhatikan aspek-aspek lingkungan eksternal yang

secara langsung maupun tidak ikut mempengaruhi kinerjanya, seperti perubahan-perubahan kondisi politik, ekonomi, social, budaya dan teknologi juga pihak-pihak yang terkait dengan penyediaan input. misalnya wajib pajak dan para pembuat kebijakan dan sebagainya.

Sementara itu Gogin (1990) menyatakan bahwa kapasitas organisasi dapat member kontribusi pada keberhasilan implementasi. Kemampuan organisasi akan dipengaruhi (produk dari) tiga hal pokok yaitu :struktur organisasi, personel (*human resources*) dan financial, tiga hal itu bervariasi antara satu daerah dengan daerah lain. Lebih lanjut Gogin menjelaskan bahwa meskipun suatu kebijakan telah dirumuskan dengan jelas (yang memungkinkan untuk diimplementasikan secara mudah) akan tetapi mungkinsaja bisa gagal oleh kelemahan struktur organisasi atau kelemahan system. Struktur organisasi atau kelemahan system. struktur yang ketat dan tersentralisir akan mendukung kepatuhan. Jika semua dalam kondisi sama (struktur, dsb) maka keberhasilan implementasi nampaknya akan sangat tergantung pada karakter dari tujuankebijakan itu sendiri, jumlah staff yang memadai, ahli, dan mempunyai motivasi tinggi akan mempermudah proses konversi pesakn kebijakan menjadi realita. hal ini akan lebih berhasil lagi apa bila juga didukung oleh kondisi financial yangmemadai.

Berdasarkan teori sebagaimana dijelaskan di atas dan dihubungkan dengan fenomenal di lapangan (*actionable causes*), maka penulis membatasi hanya melihat pengaruh-pengaruh variable obyek penelitian diungkapkan. Hanya variable yang di anggap penting saja (memiliki pengaruh besar) yang digunakan untuk mengkaji permasalahan penelitian kinerja organisasi ini. Jika dikaitkan dengan masalah yang telah dirumuskan, yakni faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, Penulis menggunakan *theoretical frame work* Gogin dan Joedono bahwa struktur organisasi, Sumber daya manusia dan financial

berpengaruh terhadap kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu, Ketiga faktor tersebut bukan merupakan faktor yang berdiri sendiri. Untuk lebih jelasnya, maka dapat dikemukakan sebagai berikut :

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kinerja organisasi public, sebagaimana pendapat Gogin (1990), Higgins (1985), Steers (1980), Joedono (1974) dan Jones (1995). Numberi (2000) menyatakan bahwa struktur organisasi merupakan unsure sangat penting karena struktur organisasi akan menjelaskan bagaimana kedudukan, tugas, dan fungsi dialokasikan di dalam organisasi. Hal ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap cara orang melaksanakan tugasnya (bekerja) dalam organisasi. Lebih lanjut Numberi menjelaskan bahwa ketika arah strategi organisasi secara keseluruhan telah ditetapkan serta struktur organisasi telah didesain, maka hal yang perlu diperhatikan adalah bagaimana organisasi tersebut melakukan kegiatan atau menjalankan tugas dan fungsinya.

Hasibuan (1996) mengemukakan bahwa struktur organisasi adalah suatu gambar yang menggambarkan tipe organisasi, departemen organisasi, kedudukan dan jenis wewenang pejabat, bidang dan hubungan pekerjaan, garis perintah dan tanggung jawab, rentang kendali dan sistem pimpinan organisasi. Sedangkan The Liang Gie (dalam Malayu, 1980) menyatakan bahwa struktur organisasi adalah kerangka yang mewujudkan pola tetap dari hubungan – hubungan diantara bidang-bidang kerja, maupun orang-orang yang menunjukkan kedudukan dan peranan masing-masing dalam kebutuhan kerjasama.

Hadari Nawawi (dalam Kaho, 1988) menjelaskan bahwa, ditinjau dari tujuannya, organisasi dapat dirumuskan sebagai, “...a system of action” atau sebagai system kerja sama sekelompok orang untuk mencapai tujuan bersama. Sedangkan ditinjau dari

strukturnya, organisasi dapat dirumuskan sebagai susunan yang terdiri dari satuan-satuan organisasi beserta segenap pejabat, kekuasaan, tugas, dan hubungan-hubungan satu sama lain dalam rangka pencapaian tertentu (Piffner, dalam, 1988).

Fillipo (1987) menyatakan bahwa hasil langsung dari proses organisasi adalah penciptaan struktur organisasi. Struktur adalah kerangka dasar dari hubungan formal yang telah disusun. Maksud dari struktur itu adalah untuk membantu dalam mengatur dan mengarahkan usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi sehingga dengan demikian usaha-usaha yang dilakukan dalam organisasi sehinggadengan demikian usaha-usaha itu terkoordinir dan konsisten dengan sasaran organisasi. Lebih lanjut Flippo menyatakan bahwa terhadap beberapa bentuk (type) dasar struktur organisasi, yaitu struktur lini, struktur fungsional, struktur proyek.

Kaho (1988) Menyatakan bahwa untuk mewujudkan suatu organisasi yang baik serta efektif dan agar struktur organisasi yang ada dapat sehat dan efisien, maka dalam organisasi tersebut perlu diterapkan beberapa asas atau prinsip organisasi. Dengan perkataan lain, organisasi yang sehat, efektif, efisien adalah organisasi yang dalam pelaksanaan tugas-tugasnya mendasari diri pada asas-asas organisasi tertentu. Asas-asas organisasi terdiri dari : 1) Rumusan tujuan dengan jelas 2) Pembagian pekerjaan 3) pelimpahan / Pendelegasian wewenang 4) koordinasi 5) rentang control 6) kesatuan komando.

Struktur organisasi adalah system formal dari aturan dan tugas serta hubungan otoritas yang mengawasi bagaimana anggota organisasi bekerjasama dan menggunakan sumber daya untuk mencapai tujuan organisasi (Jones 1995), Perhatian sebuah organisasi bentuk struktur organisasi dapat membantu organisasi untuk mempersatukan, meningkatkan kemampuan organisasi untuk mengatur dan mengendalikan keanekaragaman, menghasilkan barang dan jasa, efektivitas organisasi, mengintegrasikan dan

memotivasi fungsi-fungsi dan anggotanya, dan membawa organisasi ke arah yang lebih baik.

Jones (1995) lebih lanjut mengemukakan bahwa ada tiga pendekatan terhadap struktur organisasi. *Pertama*, pendekatan manajemen untuk merespon tantangan yang dihadapi, dimana struktur organisasi dibagi menjadi struktur mekanistik dan struktur organik. Otoritas pengambilan keputusan yang sentralistik dibentuk dari atas ke bawah secara hierarkis. Subordinasi diawasi secara tertutup dan arus informasi secara vertikal. Dalam sebuah struktur mekanistik peranan ditetapkan secara jelas. Sedangkan struktur organik lebih fleksibel dimana anggota organisasi mempunyai inisiatif untuk dapat merubah dan memberikan kesempatan untuk budaya yang dapat mengadakan antusias dan mempunyai stabilitas dan menghindari pengelompokan. *Kedua*, pendekatan efektivitas pengambilan keputusan dan komunikasi. Struktur organisasi yang pipih memiliki sedikit hierarkis sedangkan struktur organisasi yang runcing memiliki hierarkis yang banyak, Rantai komando yang panjang mengakibatkan komunikasi antar pimpinan dengan bawahan akan memakan waktu lebih lama. pengambilan keputusan menjadi lambat yang akan berakibat pada kelambatan dalam merespon keinginan pelanggan dan pesaing.

Berlawanan dengan struktur organisasi yang pipih para manajer lebih memiliki otoritas dan dapat lebih menciptakan motivasi dalam peranan yang seimbang. *Ketiga*, Pendekatan spesialis dan koordinasi, yang terdiri dari struktur organisasi fungsional, divisional, dan matriks. Tujuan dibentuknya suatu organisasi dengan struktur organisasi fungsional atau divisional adalah agar dapat dengan mudah mendayagunakan keterampilan dan sumberdayanya. Sebagai spesialis struktur organisasi fungsional meningkatkan keterampilan dan memperbaiki tugas dan kemampuan daya saing organisasi. Struktur organisasi Matriks adalah penggabungan antara jalur vertikal sebagai

pertanggung jawaban produksi. Organisasi dengan struktur matriks dikembangkan karena berbagai macam fungsi organisasi dan spesialisasi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan organisasi. Struktur organisasi matriks sangat pipih, dengan hierarki yang minimal dan fungsi otoritas yang terdesentralis.

Sementara itu, Suwoto (1978) menyatakan bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita banyak menjumpai berbagai macam organisasi. Ada empat bentuk organisasi yaitu : 1) organisasi garis (*line organization*), dalam organisasi ini tugas-tugas perencanaan, pengendalian dan pengawasan berada disatu tangan dan garis kewenangan (*line authority*) langsung dari pimpinan kepada bawahan, 2) organisasi garis dan staf (*line and staff organization*), pada umumnya digunakan untuk organisasi yang besar, daerah kerjanya luas dan mempunyai bidang-bidang tugas yang beraneka ragam serta rumit 3) organisasi fungsional (*functional organization*), adalah organisasi yang disusun berdasarkan sifat dan macam-macam fungsi yang harus dilaksanakan. 4) organisasi panitia (*committee organization*), pada umumnya dibentuk dalam waktu yang terbatas untuk melaksanakan tugasnya. Lebih lanjut Sawarto mengatakan bahwa struktur organisasi akan nampak lebih jelas dan tegas apabila dituangkan dalam bagan organisasi dan akan memberikan pengertian yang mudah mengenai organisasi yang bersangkutan.

Ancok (2001) menjelaskan bahwa harus disadari bahwa pembentukan suatu organisasi baik devisi SDM maupun devisi lainnya senantiasa memperhatikan struktur organisasi, karena akan sangat mempengaruhi perilaku pegawai. Organisasi dengan struktur yang kaku dan birokratik keputusan menjadi sangat lamban dan komunikasi antar unit organisasi menjadi berkurang. Organisasi yang kaku dan terkotak-kotak seringkali menimbulkan pemborosan karena sumberdaya (SDM dan fasilitas) tidak dapat dipakainya bersama-sama.

Keban (1995) menyatakan bahwa isu terpenting bagi seorang administrator public

adalah bagaimana menentukan design struktu organisasi yang tepat untuk mencapai tujuan organisasi public tertentu. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan batas-batas suatu organisasi formal dan dalam hal organisasi tersebut beroperasi. Lebih lanjut Keban menjelaskan dalam hal organisasi sangat menentukan dinamikan organisasi. Secara teoritis, suatu bentuk struktur organisasi sangat ditentukan oleh berbagai macam faktor sebagaimana menurut teori kontingensi, yaitu ukuran organisasi, perbedaan dalam unit-unit organisasi, stabilitas lingkungan, tujuan organisasi itu sendiri tugas-tugas yang ada dalam organisasi, karakteristik tenaga kerja dan pendekatan serta gaya management yang dianut.

Siagian (1995) senada dengan uraian di atas menyatakan bahwa kejiakan dan strategi yang telah ditetapkan dilaksanakan dalam konteks organisasional. Artinya, organisasi meruoakan wahana dan wadah melalui dan dalam mana berbagai kegiatan dilaksanakan. Ada dua segi yang biasanya dmendapat sorotan dalam membahas organisasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan suatu kebijaksanaan dan strategi yaitu struktur dan proses. Struktur ialah hubungan formal antara peranan dan tugas yang harus dimainkan dan dilaksanakan, pendelegaisan wewenang, arus informasi baik secara vertical maupun horizontal, kesatuan arah m kesatuan komando deliniasi tugas dan tanggung jawab yang jelas. Lebih lanjut siagin menjelaskan bahwa struktur organisasi yang tidak sesuai dengan tuntutan operasional dapat menjadi penghalang terhadap implementasi yang lancer. Dengan demikian gabungan antara struktur yang tepat dan proses yang terintegrasi merupakan salah satu jaminan lancarnya implementasi.

Sementara itu Gogin (dalam Effendi:2002) menyatakan bahwa struktur organisasi yang "*hierarchically integrated*" akan lebih memungkinkan implementasi berhasil, karena komunikasi akan lebih berjalan lancer dan kedekatan unit-unit organisasi dan personil. Implementasi oleh intraorganisasi akan lebih berhasil disbanding

interorganisasi (O'Toole 1983). Jumlah organisasi yang terlibat akan menentukan keberhasilan implementasi (Kelman, 1984)

Gogin (2000) menjelaskan bahwa yang menyangkut struktur organisasi adalah :

- a. Untuk kebijakan yang secara teknis tidak memerlukan adaptasi dan perubahan, struktur yang sederhana lebih cocok. dipilih Untuk kebijakan yang memerlukan adaptasi struktur yang kompleks akan lebih cocok
- b. Perlunya lembaga (agen) tunggal pelaksanaan implementasi. Agen tunggal akan mendukung integrasi hierarki akan tetapi mengurangi fleksibilitas
- c. Penyertaan LSM / swasta. Propinsi / Kabupaten sering tidak mungkin melaksanakan kebijakan sendiri, mereka kadang membutuhkan LSM dan bahkan swasta dalam implementasi kebijakan tertentu.
- d. Perlunya lembaga agency yang memiliki kewenangan untuk melakukan peran koordinasi (integrasi)

Effendi (2002) menyatakan bahwa dalam administrasi Negara faktor organisasi mendapat perhatian yang sangat besar. Betapa pentingnya peranan organisasi sebagai instrument yang pokok untuk melaksanakan pencapaian tujuan kolektif dari administrasi Negara. Masalah organisasi mencakup lima aspek, yaitu legitimasi, struktur, procedural/proses termasuk manajemen, SDM dan teknologi.

Untuk dapat dijadikan acuan, maka dalam rangka penataan kelembagaan termasuk struktur organisasi, sebaiknya dapat menerapkan manajemen modern sebagai salah satu kecenderungan global (Numberi, 2000) adapun Prinsip-Prinsip manajemen modern terdiri dari :

- a. Bereorientasi kepada konsumen atau pelanggan
- b. Menggunakan teknik-teknik yang lebih ilmiah dalam analisis dan pengambilan keputusan
- c. Bersifat jaringan kerja
- d. Bekerja di dalam tim
- e. Organisasi sebagai sistem terbuka
- f. Desentralisasi

Selain itu, organisasi harus semakin diarahkan menuju kelembagaan yang semakin kompleks dewasa ini. Memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka kebijakan organisasi pemerintah diarahkan pada reformasi kelembagaan menuju organisasi masa depan yang bercirikan :

- 1) Visi dan misi organisasi jelas

Dengan visi dan misi yang jelas, akan dapat disusun organisasi yang benar-benar sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan terutama mampu menyeimbangkan dengan antara kemampuan sumber daya organisasi dengan kebutuhan nyata masyarakat.

- 2) Organisasi Flat atau datar

Dengan organisasi yang membentuk flat atau datar berarti struktur organisasi tidak perlu terdiri dari banyak tingkatan atau hierarki, organisasi cukup memiliki satu layer di bawah puncak pimpinan.

Dengan bentuk organisasi seperti itu maka proses dalam organisasi akan dapat dilakukan dengan cepat karena dengan penghematan layer dalam struktur organisasi, maka waktu yang kurang diperlukan akan tereduksi

3) Organisasi ramping atau tidak banyak pembedangan

Dengan organisasi yang berbentuk ramping, maka jumlah pembedangan secara horizontal dapat ditekan seminimal mungkin sesuai dengan beban dan sifat tugasnya, sehingga span of controlnya berada pada posisi ideal

4) Organisasi Jejaring (*Network Organization*)

Dalam era globalisasi dewasa ini, harus ditumbuhkan organisasi jejaring, karena organisasi seperti inilah yang mampu melakukan aktifitas organisasi secara cepat efisien. Organisasi yang tidak memanfaatkan networking, cepat atau lambat akan ditinggalkan pelanggan, tertinggal Karena kalah bersaing. Untuk itu berbagai kalangan menilai bahwa organisasi yang sukses adalah “*small organization, large networking*”

5) Strategi organisasi pembelajaran (*Learning Organization*)

Dalam suasana perubahan yang sangat cepat dewasa ini diperlukan organisasi yang mampu mentransformasikan dirinya untuk menjawab tantangan-tantangan dan kesempatan yang timbul akibat perubahan tersebut kita kenal sebagai “organisasi pembelajar”. Pada akhirnya organisasi yang cepat belajar akan mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan yang terjadi

6) Organisasi banyak diisi jabatan-jabatan profesional

Hal ini terkait bentuk organisasi yang flat dengan layer struktural yang minimal, maka sejalan itu organisasi lebih banyak diisi oleh pejabat-pejabat profesional atau fungsional yang bekerja berdasarkan kompetensi yang bersangkutan.

7) Organisasi bervariasi

Organisasi terbuka memiliki struktur yang berbeda antara satu lembaga yang lain, sesuai dengan kondisi dan prioritas misi masing-masing lembaga tersebut. Untuk ini pendekatan uniformitas yang kaku tidak tepat digunakan dalam penataan kelembagaan (Numberi 2000).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan ditentukan salah satunya oleh struktur organisasi yang dibentuk. Karena struktur organisasi akan menentukan pola perilaku individu dalam pencapaian tujuan organisasi.

2. Sumber Daya Manusia

Berkenan dengan pokok bahasan kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi, diasumsikan bahwa faktor sumber daya manusia akan berpengaruh terhadap kinerja organisasi Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi. Manusia merupakan salah satu sumber yang berpengaruh terhadap kinerja public

Menurut Zainum (1989) sumber daya manusia menempati kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor yang sangat menentukan untuk tingkat keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Sependapat dengan hal itu, keberhasilan dan kegagalan suatu organisasi. Sependapat dengan hal itu, Amstrong (1988) menjelaskan bahwa sumber daya manusia sebagai harta paling penting hanya dimiliki suatu organisasi.

Sementara itu Notoatmodjo (1992) melihat sumber daya manusia dari dua aspek yaitu a) mutu atau kualitas yang diukur melalui kemampuan fisik seperti kesehatan jasmani, kekuatan untuk bekerja dan kemampuan non fisik misalnya mental. b) Jumlah atau kuantitas, yaitu banyaknya sumber daya sebagai tenaga kerja dalam suatu

organisasi. Lebih lanjut Notoatmodjo, mengatakan bahwa manfaat sumber daya manusia dalam suatu organisasi memegang peranan penting. Fasilitas yang canggih dan lengkap pun belum merupakan jaminan keberhasilan suatu lembaga, tanpa diimbangi kualitas dari staf atau karyawan yang akan memanfaatkan fasilitas itu.

Manusia adalah aktor utama setiap organisasi dimanapun dan kapanpun bentuknya. Setiap individu yang masuk dalam organisasi yang masuk dalam organisasi membawa karakteristiknya seperti kemampuan, percaya diri, pengharapan, kebutuhan dan pengalaman komponen karakteristik ini kemudian membentuk perilaku pegawai (Thoha 2001) lebih lanjut Thoha menyatakan bahwa organisasi hanya merupakan satu wadah untuk mencapai tujuan dan manusialah yang akan membawa organisasi tersebut mencapai tujuannya.

Esman (1989) menyatakan bahwa sumberdaya yang paling penting untuk sebuah organisasi adalah stafnya yang memiliki pengetahuan dan keahlian serta mempunyai komitmen terhadap program organisasi, dengan kata lain perkataan staf yang berkualitas.

Dalam organisasi pemerintahan, sumberdaya manusia sering disebut sebagai aparatur yaitu pegawai yang melaksanakan tugas-tugas kelembagaan (Widjaja 1995) sedangkan Suradinata (1996), mengemukakan bahwa sumber daya manusia sering disebut sebagai *Human resource* tenaga atau kekuatan manusia (*energy atau power*). Kenyataan yang dihadapi faktor yang sangat menentukan sebagai pemegang kunci tetap ada pada manusianya, sebagai perencana, pelaksana, pengendali, pengawasan maupun evaluasi dan memanfaatkan hasilnya.

Simamora (1995) Menyatakan bahwa keberadaan sumber daya manusia sangat penting sebagai unsur filosofis. Unsur filosofis itu adalah 1) karyawan dipandang sebagai

investasi jika dikembangkan dan dikelola secara efektif akan memberikan imbalan bagi organisasi dalam bentuk produktivitas yang lebih besar 2) manajer membuat berbagai kebijakan, program dan praktek yang memuaskan baik bagi kebutuhan ekonomi maupun kepuasan pribadi karyawan 3) manajer menciptakan lingkungan kerja yang didalamnya para karyawan diarahkan mengembangkan dan menggunakan keahlian serta kemampuannya semaksimal mungkin 4) program dan praktek personalia diciptakan agar terdapat keseimbangan antara kebutuhan karyawan dengan kebutuhan organisasi. Setiap organisasi selalu berusaha mencapai tujuannya dengan menggunakan manusia secara efisien dan efektif.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya sangat ditentukan oleh sumberdaya yang tersedia yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan dalam upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup. Dari sumberdaya yang tersedia dalam organisasi, sumberdaya manusia memegang peranan yang sentral dan paling menentukan. Tanpa sumber daya manusia yang handal, pengolahan, penggunaan dan pemanfaatan sumber-sumber lainnya akan menjadi tidak efektif, efisien dan produktif. dalam keadaan yang demikian tidaklah mengherankan bahwa tujuan serta program organisasi yang telah ditetapkan dengan baik akan tetapi sulit terwujud secara baik dan benar.

3. Finansial

Finansial adalah salah satu sumber daya yang mempengaruhi terhadap kinerja publik, sebagaimana pendapat Gogin (1990) dan Higgins (1985) Soerjadi (1993) Mengartikan finansial sebagai biaya atau cost dan anggaran atau budget. biaya merupakan sejumlah uang yang disediakan dan dipergunakan secara langsung untuk mencapai kegiatan di dalam suatu proses kelembagaan.

Kaho (1988) menyatakan bahwa faktor keuangan yang merupakan tulang punggung bagi terselenggaranya aktivitas pemerinyahan daerah. salah satu ciri dari daerah. salah satu ciri dari daerah oronom adalah terletak pada kemampuan *self supporting* dalam bidang keuangan. Karena itu, kemampuan keuangan ini akan sangat memberikan pengaruh terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah.

Adanya financial, dalam suatu organisasi, selain faktor SDM dan sarana fisik lainnya, dukungan anggaran memegang peranan penting dalam kegiatan organisasi. Tujuan yang telah dirumuskan dengan strategi dan program sebaik apapun harus diikuti dengan dukungan anggaran yang menandai.

Finansial adalah jumlah dan tingkat ketersediaan dana / anggaran yang dialokasikan untuk pengelolaan lingkungan hidup. Aspek financial meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari instansi pemerintah. Karena aspek financial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan yang dapat mempengaruhi kinerja suatu organisasi.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberhasilan Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya akan ditentukan oleh adanya dukungan financial, karena untuk operasionalisasi tugas-tugas perlu didukung oleh anggaran yang cukup. Sehingga dengan adanya dukungan anggaran yang cukup tujuan organisasi akan mudah dicapai.

2.2 Pengertian Persepsi

Istilah persepsi merupakan istilah dari Bahasa Inggris yakni “dari kata *perception* yang berarti penglihatan, keyakinan dapat melihat atau mengerti” (Muchtari, T.W., 2007 : 13). Untuk lebih jelasnya akan dikutip beberapa pengertian tentang persepsi yang dikemukakan oleh beberapa ahli :

Desiderato (Muchtar, T.W.,2007 : 13) mengemukakan :“Persepsi adalah pengamatan tentang objek-objek, peristiwa atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Persepsi ialah memberikan makna pada stimulus indrawi (*sensory stimuli*)”.

Sedangkan menurut Ensiklopedia Umum (Muchtar, T.W., 2007 : 13):

“Persepsi adalah proses mental yang menghasilkan bayangan individu sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu, baik secara indera penglihatan, indera perabaan dan sebagainya, sehingga bayangan itu dapat disadari”.

Menurut Sarlito W. Sarwono (Mochamad J. A.,2004 : 12) :

“Persepsi adalah proses kategorisasi. Organisme untuk masukan tertentu (objek-objek di luar, peristiwa dan lain-lain), dan organisme itu berespon dengan menghubungkan masukan itu dengan salah satu kategori (golongan) objek-objek atau peristiwa. Proses menghubungkan ini adalah proses aktif dimana individu yang bersangkutan dengan sengaja mencari kategorisasi yang tepat, sehingga ia dapat mengenali atau memberi arti kepada masukan tersebut. Dengan demikian persepsi juga bersifat *inferensial* (mengambil kesimpulan)”.

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik suatu kesamaan pendapat bahwa pada dasarnya persepsi merupakan suatu pengamatan individu atau proses pemberian makna sebagai hasil pengamatan tentang suatu objek, peristiwa, dan sebagainya melalui panca inderanya, yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan penafsiran pesan sehingga seseorang dapat memberikan tanggapan mengenai baik buruknya atau positif negatifnya hal tersebut.

2.2.1 Ciri dan Karakteristik Persepsi

Irwanto (Umi Amalia, 2003) mengemukakan ciri-ciri umum persepsi adalah sebagai berikut ;

- a. Rangsangan-rangsangan yang diterima harus sesuai dengan moralitas tiap-tiap indera, yaitu sensoris dasar dan masing-masing indera (cahaya untuk penglihatan, bau untuk penciuman, suhu bagi perasa, bunyi bagi pendengaran, sifat permukaan bagi peraba dan sebagainya).
- b. Dunia persepsi mempunyai dimensi ruang (sifat ruang), kita dapat menyatakan atas-bawah, tinggi-rendah, luas-sempit, depan-belakang, dan lain sebagainya.
- c. Dimensi persepsi mempunyai dimensi waktu seperti cepat-lambat, tua-muda, dan lain sebagainya.
- d. Objek-objek atau gejala-gejala dalam dunia pengamatan mempunyai struktur yang menyatu dengan konteksnya. Struktur dan kontek ini merupakan keseluruhan yang menyatu, contohnya kita melihat meja tidak berdiri sendiri tetapi diruang tertentu, posisi atau letak tertentu.
- e. Dunia persepsi adalah dunia penuh arti, kita cenderung melakukan pengamatan atau persepsi pada gejala-gejala yang mempunyai makna bagi kita, yang ada hubungannya (dengan tujuan yang ada pada dirikita).

Irvin T. Rock (Muchtar, T. W. 2007: 14-15) menjelaskan, karakteristik seseorang terhadap suatu objek meliputi :

- a. Proses mental yang berfikir, yang menimbang hal-hal yang dianggap paling baik dari beberapa macampilihan.

- b. Perseptor dalam mempersiapkan sesuatu tidak terlepas dari latar belakang perseptor.
- c. Persepsi dapat dijadikan dasar bagi seseorang untuk menseleksi dan mengambil tindakan.
- d. Secara umum dalam mempersepsikan sesuatu, seseorang harus dibekali pengetahuan, panca indera, dan kesadaran lingkungan.

Dari uraian di atas, maka jelaslah bahwa dunia persepsi mempunyai dimensi ruang dan waktu dengan struktur yang menyatu dengan konteksnya. Pengalaman indera individu akan sangat tergantung kepada intensitas dan sifat-sifat rangsang yang diterimanya. Luas sempitnya individu dalam mempersepsikan sesuatu akan dipengaruhi oleh latar belakang individu

2.2.2 Proses Terjadinya Persepsi

Manusia hidup sekaligus berinteraksi dengan lingkungannya, dengan demikian manusia tanggap terhadap rangsangan yang datang dari lingkungan. Salah satu bentuk dari tanggapan itu adalah berupa proses pemberian arti atau penafsiran terhadap berbagai objek yang ada. Proses pemberian arti tersebut dinamakan persepsi.

Dikutip dari Muchtar, T. W. (2007 : 15) :

“Manusia merupakan makhluk sosial yang selalu berinteraksi dengan lingkungan, manusia atau individu lainnya dengan menggunakan alat indera. Indera tersebut akan dipergunakan untuk berhadapan atau berhubungan dengan suatu objek atau peristiwa. Proses interaksi itu terjadi karena ada stimulus yang tertangkap panca indera, yang kemudian akan menimbulkan respon pada individu tersebut. Dengan adanya stimulus tersebut, individu akan memberikan makna terhadap objek atau

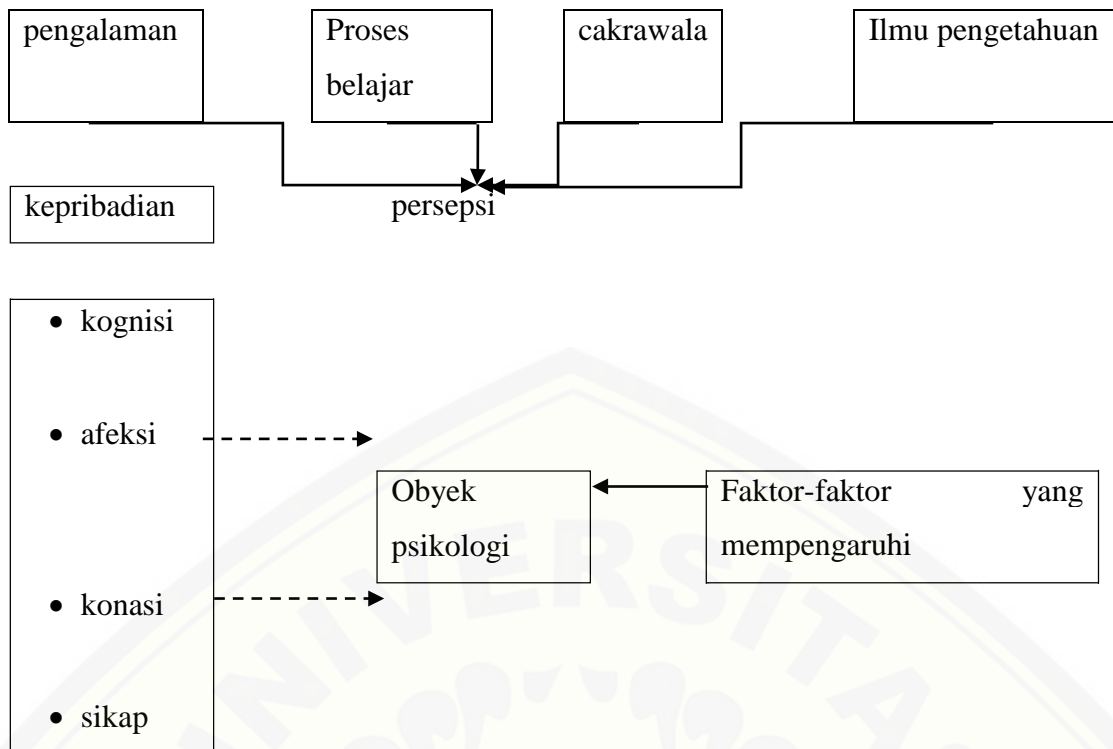
peristiwa. Proses pemberian makna ini dapat disebutkan dengan *proses mempersepsi*”.

“Persepsi pada dasarnya hanya akan terjadi apabila individu menerima rangsangan dari luar dirinya, sehingga persepsi akan timbul setelah adanya pengamatan terhadap objek” (Santhy Handayani, 2005 : 8). Setiap individu mempunyai kecenderungan untuk selalu memberikan makna terhadap rangsangan yang diterimanya dengan pengetahuan dan pengalaman yang dimilikinya, yang kemudian individu tersebut memberikan tanggapan terhadap rangsangan yang diterimanya itu. Kemampuan individu dalam memberikan respon terhadap rangsangan yang diterimanya itu disebut kemampuan mempersepsi. Seperti Moh. Surya (1981 : 41) yang mengemukakan bahwa “Persepsi adalah proses penerimaan, penafsiran dan pemberian arti terhadap perangsang yang diterima individu melalui alatindera”.

Sementara menurut Mc Croskey dan Whelness (dalam Ritonga, 1998 : 15) menyebutkan ada empat tahapan persepsi :

1. Penerimaan pesan atau informasi dari luar.
2. Memberikan kode pada informasi yang diindera.
3. Menginterpretasikan informasi yang telah diberikan kode tersebut.
4. Menyimpulkan arti dalam ingatan.

Selanjutnya Mar’at (Mochamad, J.A. 2004 : 20) menggambarkan proses terjadinya persepsi adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 Proses Terjadinya Persepsi
Sumber : Mochamad, J.A. 2004 : 20

Bila dilihat dari bagan yang telah dibuat, terlihat bahwa persepsi merupakan aspek kognisi dari sikap. Faktor pengalaman dan proses belajar atau sosialisasi memberikan bentuk serta struktur terhadap apa yang dilihat. Sedangkan pengetahuan dan cakrawala memberikan arti terhadap objek psikologi tersebut. Melalui komponen kognisi akan timbul ide, kemudian konsep mengenai apa yang di lihat. Kemudian berdasarkan norma yang dimiliki pribadi seseorang, akan terjadi keyakinan yang berbeda terhadap objek tertentu.

Persyaratan-persyaratan persepsi ini telah banyak dikemukakan oleh para ahli, pada dasarnya memiliki arti yang sama. Dari beberapa para ahli tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa syarat –syarat terjadinya persepsi adalah :

1. Adanya objek fisik, dimaksudkan yaitu objek tersebut dapat dirasakan, dicium, diraba, didengar sehingga menimbulkan stimulus.

2. Syarat fisiologis, dimaksudkan adanya tiga faktor dominan yaitu adanya alat indera, saraf sensorik dan otak.
3. Syarat psikologis, dimaksudkan yaitu adanya perhatian dari individu sehingga dapat menyadari apa yang diterima.

2.2.3 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi dan Menyebabkan Kesalahan Pada Persepsi

Persepsi seseorang tidaklah timbul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berkenaan dengan keberadaan individu yang bersangkutan, sedangkan faktor eksternal adalah faktor pengaruh yang diakibatkan oleh keberadaan rangsangan tersebut.

Jalaludin Rakhmat (1999 :55-56) dengan rinci mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Faktor yang bersifat fungsional, diantaranya kebutuhan, pengalaman, motivasi, perhatian, emosi dan suasana hati.
- b. Faktor yang bersifat struktural diantaranya intensitas rangsangan, ukuran rangsangan, perubahan rangsangan dan pertentangan rangsangan.
- c. Faktor kultural atau kebudayaan yaitu norma-norma yang dianut oleh individu.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Sarlito Wirawan (1984 : 97) yang mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :

- a. Kuat lemahnya rangsangan, yang ditemukan oleh kejelasan, pengulangan gerak, ukuran dan bentuk rangsangan. Makin kuat rangsangan, makin kuat pula kerja indera.

- b. Cara kerja alat indera menentukan cepat tepatnya dan lancarnya proses terjadinya persepsi.
- c. Kadar intensitas kebutuhan, besarnya perhatian, kebutuhan dan kesiapan yang dimiliki individu menyebabkan terjadinya persepsi.
- d. Pengalaman individu tentang stimulus atau rangsangan yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa persepsi dipengaruhi oleh faktor rangsangan yang datang dari objek maupun peristiwa, dan faktor individu yang bersangkutan dengan karakteristiknya. Oleh karena itu, dapat diasumsikan dari persepsi ini bahwa individu akan menyimpulkan pendapat dan kesan berupa senang atau tidak senangnya, baik ataupun buruk dan adanya kesiapan untuk menerima ataupun menolak rangsangan yang diterimanya.

Sedangkan faktor-faktor penyebab kesalahan dalam persepsi adalah sebagai berikut :

- a. Informasi yang kurang cukup, faktor ini merupakan penyebab utama dalam kesalahan menafsirkan pesan.
- b. *Stereotype*, yaitu merupakan gambaran atau tanggapan tertentu mengenai sifat-sifat objek yang dikelompokkan pada konsep-konsep tertentu.
- c. Kesalahan dalam logika, kadang-kadang dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai pandangan umum terhadap suatu objek. Misalnya apabila seseorang memperlihatkan sifat-sifat serius, tidak pernah humor, kemudian kita beranggapan bahwa orang tersebut bersifat angkuh, maka hal ini akan menjadi penyebab kesalahan persepsi.
- d. *Halo effect dan devil effect*, dalam hal ini orang beranggapan bahwa jika suatu objek atau seseorang berbuat sesuatu, maka selanjutnya orang tersebut akan menambahkan dengan ciri-ciri tertentu pula.

2.2.4 Cara Pengukuran Persepsi

Pada dasarnya persepsi dapat diasosiasikan dengan pendapat, opini atau sikap (*attitude*). Mar'at (1982) menyebutkan persepsi sebagai aspek kognitif dari sikap. Mengingat bahwa persepsi merupakan aspek kognitif dari sikap, maka untuk mengungkap atau mengukur persepsi dapat digunakan instrumen pengungkapan sikap. Lebih jauh Mar'at mengemukakan tiga pendekatan untuk mengungkap sikap yaitu wawancara langsung, observasi dan pernyataan sikap.

Untuk mengungkap sikap seseorang, termasuk persepsi terhadap suatu objek psikologis, Sugiyono (2008 : 133) menjelaskan bahwa ada tiga metode, yaitu skala *Likert*, metode *Thurstone* dan skala *Guttman*. Skala *Likert* biasanya menyajikan alternatif jawaban kepada responden dalam lima alternatif. Kendati demikian, dalam kenyataannya dapat dimodifikasi menjadi dua atau tiga pilihan. Masing-masing jawaban memiliki bobot nilai tertentu sesuai arah pernyataan sikap atau persepsi.

Sementara itu dalam bentuk *Thurstone*, responden dituntut untuk memiliki dua atau tiga pernyataan pendiriannya terhadap butir-butir pernyataan persepsi yang telah disusun menurut intensitas dari yang paling kuat sampai yang paling rendah atau lemah.

Sanafiah Faisal (1982 : 191) menjelaskan bahwa :

“Peneliti harus percaya saja bahwa apa yang orang katakan adalah keyakinan dan perasaannya ini “daerah” opini lewat pengajuan pertanyaan-pertanyaan tertentu maka sebagian dari pendapat itu akan diketahui, dari pertanyaan pendapat itulah biasa diperlihatkan atau diramalkan apa yang sesungguhnya di yakini”.

2.2.5 Proses Persepsi

Menurut Miftah Toha (2003: 145), proses terbentuknya persepsi didasari pada beberapa tahapan, yaitu:

a. Stimulus atau Rangsangan Terjadinya persepsi diawali ketika seseorang dihadapkan pada suatu stimulus/ rangsangan yang hadir darilingkungannya.

b. Registrasi

Dalam proses registrasi, suatu gejala yang nampak adalah mekanisme fisik yang berupa penginderaan dan syarat seseorang berpengaruh melalui alat indera yang dimilikinya. Seseorang dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi yang terkirim kepadanya tersebut.

c. Interpretasi

Interpretasi merupakan suatu aspek kognitif dari persepsi yang sangat penting yaitu proses memberikan arti kepada stimulus yang diterimanya. Proses interpretasi tersebut bergantung pada cara pendalaman, motivasi, dan kepribadian seseorang.

2.3 Partai Politik Pemilu Kada Banyuwangi Tahun 2010

Lebih dari satu dasawarsa reformasi berjalan, yang me-ngamanatkan desentralisasi terhadap seluruh aspek kehidupan, namun kuatnya aroma pusat dalam hal pengelolaan partai masih dirasakan dan seakan-akan pengelola partai di daerah (lokal) masih belum memiliki kekuatan kapasitas kelembagaan (*capacity building*) yang mengakomodasi nilai-nilai lokal dan bebas dari dominasi intervensi serta „limbah“ penetrasi kebijakan pusat. Dengan demikian, pembicaraan tentang kapasitas ke-lembagaan partai, mengingat peran strategis partai dalam kehidupan demokrasi

saat ini. Partai politik menjadi salah satu penentu keputusan negara. Hal ini bisa dilihat mulai dari masalah penting dalam aras nasional seperti menentukan amandemen Undang-undang Dasar 1945, TAP MPR, mengusung calon dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (walaupun pemilihannya diserahkan langsung pada rakyat, namun dalam pengusulannya, partai politik merupakan satu-satunya pintu untuk menghantarkan calon). Dalam aras regional peran strategis partai adalah pencalonan gubernur dan wakil gubernur, sedangkan dalam aras lokal memiliki peran vital dalam hal pencalonan bupati dan wakil bupati, penyusunan dan penetapan PERDA, bahkan menentukan keberadaan panti pijat seperti kasus Surabaya (Aribowo, 2004:8).

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2002 yang diperbaharui dengan UU No 02 Tahun 2008 tentang partai politik merupakan produk hukum dan politik yang sarat memuat kepentingan partai politik dan elitnya. Perdebatan yang mengiringi pembahasan dan pengesahan undang-undang tersebut bermuara pada kepentingan partai politik untuk meneguhkan dominasinya dalam struktur kekuasaan di Indonesia. Jika rezim sebelumnya, Orde Baru, perdebatan di parlemen mengusung dan memperjuangkan kepentingan Birokrasi, ABRI, Golkar (sering disebut jalur ABG) dan pengusaha negara. Di era reformasi kepentingan oligarki partai dominan dalam ranah *publik policy*.

Sebagaimana amanat UU No 02 Tahun 2008, yang dimaksud partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara su-karela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kemudian dirumuskan 5 (lima) fungsi partai politik (pasal 11) sebagai berikut.

1. Sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat.
3. Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakannegara.
4. Partisipasi politik warga negara Indonesia.

Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan *gender* (Moh. Ilyas Rolis IAIN Sunan Ampel Surabaya. *Jurnal Review Politik* Volume 02, No 1, Juni 2012)

Komposisi Partai Politik yang berhasil memperoleh kursi pada DPRD Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2 Persentase Anggota DPRD Hasil Pemilu 2009

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
1	PDI P	12	24 %
2	Partai Demokrat	10	20 %
3	Golkar	7	14 %
4	PKB	6	12 %
5	PKNU	5	10 %
6	Partai Gerindra	4	8 %
7	Partai Hanura	2	4 %
8	PPP	2	4 %
9	PAN	1	2 %
10	Partai Republikan Nusantara	1	2 %

Sumber : Banyuwangi dalam Angka Tahun 2010

Pasal 5 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menguraikan bahwa

- 1) Perhitungan perolehan kursi dilakukan dengan cara mengalikan jumlah kursi DPRD dengan angka 15% (lima belasperseratus).

- 2) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik mengusulkan bakal pasangan calon menggunakan ketentuan perolehan paling rendah 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila hasil bagi jumlah kursi DPRD yang bersangkutan menghasilkan angka pecahan, perolehan 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi dihitung dengan pembulatan keatas.

Mendasarkan pada peraturan KPU tersebut maka apabila perolehan jumlah kursi pada DPRD tidak mencapai 15 % maka pada Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 menyebutkan bahwa

“ Dalam hal bakal pasangan calon diajukan oleh gabungan partai politik yang memiliki kursi di DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penghitungan pemenuhan persyaratan dilakukan dengan cara menjumlahkan perolehan kursi gabungan partai politik tersebut dan menghitung/menetapkan jumlah kursi paling rendah 15% (lima belas per seratus) dikalikan dengan jumlah kursi DPRD”

Komposisi Partai Pendukung dan Gabungan Partai Pendukung pata calon bupati dan wakil bupati Banyuwangi tahun 2010 akhirnya sitetapkan oleh KPU Kabupaten Banyuwangi berjumlah 3 (tiga) pasangan calon yang lolos maju dalam pilkada 14 Juli 2010 adalah Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko (hasil dukungan Gabungan Partai PDIP, PKB dan PKNU), Jalal-Yusuf Nur Iskandar (Partai Demokrat) dan Emilia Contesa-Zaenuri Ghazali (dukungan Gabungan Partai Gerindra, PAN,Republikan).

KPU Kabupaten Banyuwangi menyebutkan bahwa alas an tidak meloloskan pasangan Ratna Ani Lestasi-Pebdy Arisdiawan sebagai calon bupati dan calon wakil bupati, karena tidak memenuhi persyaratan pencalonan.

Selain pasangan Ratna Ani Lestari (Bupati Banyuwangi saat ini)-Pebdy Arisdiawan, KPU Kabupaten Banyuwangi dalam pengumuman penetapan pasangan

cabup-cawabup,, juga tidak meloloskan pasangan Mulyono-Untung Harjito karena alasan yang sama. Dalam penjelasannya KPU Kabupaten Banyuwangi mengutarakan alasan ketidaklolosan pasangan tersebut Ia menjelaskan kepengurusan parpol yang mengajukan kedua pasangan calon itu tidak sah dan KPU Banyuwangi telah melakukan verifikasi kepada pengurus partai di tingkat provinsi dan pusat yang mengusung calon tersebut.

Pencalonan Ratna Ani Lestari-Pebdy Arisdiawan terganjal dualisme kepengurusan Partai Golkar dan Partai Pengusaha Pekerja Indonesia.Pebdy Arisdiawan sebagai Ketua DPD Golkar Banyuwangi juga telah dicopot jabatannya oleh DPD Golkar Jawa Timur, saat mendaftar ke KPU Banyuwangi pada 19 April lalu.Ia dipecat karena tidak mengindahkan instruksi DPP untuk mendukung pencalonan pasangan Abdullah Azwar Anas-Yusuf Widyatmoko.

2.4 Kerangka Teoritis

a Pengaruh Struktur Organisasi terhadap Persepsi

Organisasi merupakan wadah berhimpunnya sejumlah manusia dengan kepentingan yang sama untuk melakukan berbagai aktivitas mencapai tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan tersebut, dukungan dari organisasi kepada anggotanya maupun sebaliknya sangat diperlukan. Dukungan organisasi yang dipersepsikan dengan baik oleh pekerja akan meningkatkan kinerja pekerja terhadap organisasi (Polly, 2002:197; Darden, et al.,1989:249).

Persepsi dukungan organisasi adalah merupakan (konsep utama dari teori dukungan organisasi - *organizational support theory* Eisenberger et al. (1986) menyatakan bahwa Persepsi Dukungan Organisasi terhadap dirinya. sebagai keyakinan global karyawan mengenai sejauhmana organisasi peduli terhadap kesejahteraan mereka dan menghargai kontribusi mereka. Eisenberger, Huntington, Hutchinson,& Sowa, 1986; Rhoades & Eisenberger, 2002

b Pengaruh Faktor Sumberdaya Manusia terhadap Persepsi

Hariandja (2005) berpendapat bahwa sumberdaya manusia dipersepsikan sebagai factor yang sangat penting peranannya dalam organisasi. sumberdaya manusia dipersepsikan sebagai asset yang bernilai kualitas maupun kuantitas sesuai dengan tanggungjawab yang

Selain itu sumberdaya manusia dipengaruhi oleh tingkat pendidikan, inisiatif, pengalaman kerja, dan motivasi kerja karyawan. Hasil kerja seseorang akan memberikan umpan balik bagi orang itu sendiri untuk selalu aktif melakukan pekerjaannya secara baik dan diharapkan akan menghasilkan mutu pekerjaan yang baik pula. Pendidikan mempengaruhi sumberdaya manusia karena dapat memberikan wawasan yang lebih luas untuk berinisiatif dan berinovasi dan selanjutnya berpengaruh terhadap sumberdaya manusia.

Sopiah (2008) menyatakan sumberdaya manusia juga bisa mempengaruhi persepsi seseorang. Sumberdaya manusia yang kondusif, misalnya dukungan dari atasan, teman kerja, sarana dan prasarana yang memadai akan menciptakan kenyamanan tersendiri dan akan memacu kondisi sumberdaya manusia yang baik. Sebaliknya, situasi sumberdaya manusia yang buruk karena sarana dan prasarana yang tidak memadai, tidak adanya dukungan dari atasan, dan banyak terjadi konflik akan memberi dampak negatif yang mengakibatkan kemerosotan pada kinerja seseorang.

c Pengaruh Faktor Finansial terhadap Persepsi

Salah satu faktor yang menyebabkan perusahaan kurang berjalan dengan maksimal adalah kurang berperannya karyawan dalam suatu perusahaan. Finansial merupakan faktor yang dipersepsikan sebagai faktor penarik bagi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya. Gaji merupakan salah satu bentuk kompensasi, yang didefinisikan sebagai manfaat jasa yang diberikan secara teratur atas prestasi kerja dan diberikan kepada karyawan (Wursanto 2005).

Persepsi seseorang terhadap pemenuhan kebutuhan baik dalam bidang materi maupun non materi, seperti kebutuhan sosial, *prestise*, psikologis, dan intelektual sebagai sebuah kompensasi atas kinerja yang dilakukan karyawan kepada perusahaan layak untuk diperhatikan, terutama saat kinerja karyawan mulai melemah (Panudju 2004).

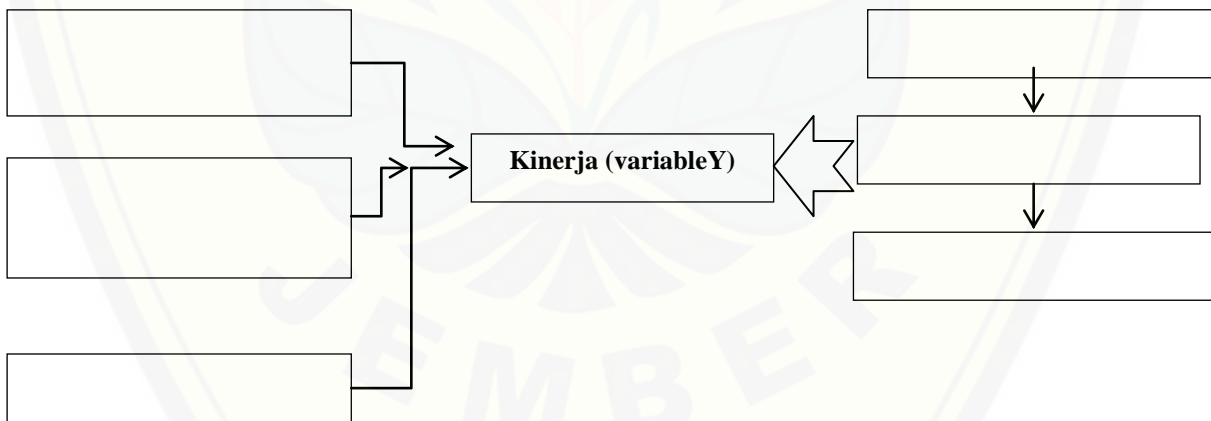
Rendahnya kinerja karyawan menandakan ketidakstabilan organisasi sehingga karyawan di dalamnya tidak dapat menjalankan fungsi dan perannya secara efektif (Astuty 2010). Pada faktanya perusahaan seringkali tidak memperhatikan gaji sebagai bentuk perwujudan kompensasi bagi karyawan sehingga karyawan merasa kurang dihargai.

Dengan kesesuaian gaji yang diberikan perusahaan terhadap karyawan, maka akan merangsang tumbuhnya motivasi kerja di dalam diri seorang karyawan.

Gaji meliputi tunjangan-tunjangan yang digunakan dalam waktu yang relatif panjang, seperti perbulan atau pertahun. Gaji per jam dan per hari biasanya diberikan satu kali dalam seminggu atau satu kali perbulan, namun gaji pertahun biasanya juga diberikan setiap bulan (Samsudin 2009). Gaji dan motivasi kerja sangat penting dalam meningkatkan kinerja karyawan. Gaji menjadi pendorong seseorang melaksanakan suatu kegiatan guna mendapatkan hasil yang terbaik, motivasi kerja karyawan perlu dibangkitkan agar karyawan dapat melaksanakan kinerja yang terbaik, sebaliknya karyawan yang tidak mempunyai motivasi kerja yang tinggi dalam melakukan pekerjaannya akan sulit untuk bekerja dengan baik dan cenderung tidak bertanggung jawab sekalipun karyawan tersebut memiliki kemampuan operasional yang baik (Panudju 2003).

Berdasarkan kerangka teoritis di atas, maka kerangka penelitian dapat digambarkan sebagai berikut :

KERANGKA TEORITIS



METODE PENELITIAN**3.1 Metode Penelitian yang Digunakan**

Penelitian ini menggunakan paradigma kuantitatif, yaitu penyelidikan menjadi masalah sosial atau manusia, berdasarkan pada pengujian teori yang terdiri dari variabel, yang diukur dengan angka, dan dianalisa dengan prosedur statistik, dalam rangka untuk menentukan apakah generalisasi prediktif dari teori. Paradigma kuantitatif menekankan pada pengujian teori melalui pengukuran variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistik.

Penelitian yang menggunakan pendekatan deduktif yang bertujuan untuk menguji hipotesis merupakan penelitian yang menggunakan paradigma kuantitatif. Paradigma ini disebut juga dengan paradigma tradisional (traditional), positivis (positivist), eksperimental (experimental), atau empiris (empiricist). Penelitian kuantitatif adalah penelitian masalah sosial atau manusia yang berdasarkan pada pengujian sebuah teori yang terdiri dari beberapa variabel, diukur dgn angka, dianalisa dgn prosedur statistik untuk menentukan generalisasi prediktif terori tersebut. Metode penelitian merupakan suatu cara penulis dalam menganalisis data. Adapun pengertian dari metode penelitian menurut Sugiyono (2010:4) adalah:

“Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data yang objektif, valid, dan reliabel dengan tujuan dapat ditemukan, dibuktikan, dan dikembangkan suatu pengetahuan sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.”

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa metode penelitian merupakan cara pemecahan masalah penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan cermat dengan maksud mendapatkan fakta dan kesimpulan agar dapat memahami, menjelaskan,

meramalkan, dan mengendalikan keadaan. Metode penelitian juga merupakan cara kerja untuk memahami dan mendalami objek yang menjadi sasaran.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif. Menurut Moh. Nazir (2011:54) pengertian dari metode deskriptif analisis adalah :

“Metode analisis deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, serta hubungan antar fenomena yang diselidiki.”

Metode deskriptif analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang menekankan analisisnya pada data-data *numeric* (angka) sehingga akan diketahui hubungan yang signifikan antara variabel yang diteliti dan menghasilkan kesimpulan yang akan memperjelas gambaran mengenai obyek yang diteliti. Menurut Sugiyono (2010:8), metode penelitian kuantitatif adalah :

“Metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada sampel filsafat positivisme digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.”

Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa metode deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif merupakan metode yang bertujuan menggambarkan secara sistematis dan faktual tentang fakta-fakta serta hubungan antar variabel yang diselidiki dengan cara mengumpulkan data, mengolah, menganalisis, dan menginterpretasi data dalam pengujian hipotesis statistik.

Peneliti menggunakan metode tersebut karena penelitian ini ditujukan untuk menggambarkan dengan jelas apakah terdapat pengaruh pelaksanaan Pemilu Kada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 terhadap kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi,

sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif karena analisis data bersifat kuantitatif /statistik.

3.2 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap pertanyaan penelitian. Oleh karena itu, perumusan hipotesis sangat berbeda dari perumusan pertanyaan penelitian. Rumusan-rumusan hipotesis penelitian, pada gilirannya sewaktu akan diuji dengan menggunakan metode statistika, perlu diterjemahkan dalam bentuk pernyataan simbolik. Simbol-simbol yang digunakan dalam rumusan hipotesis statistika adalah simbol-simbol parameter. Parameter adalah besaran-besaran yang ada pada populasi. Hipotesis penelitian adalah dugaan yang perlu diverifikasi atau dibuktikan benar salahnya, yang menawarkan kemungkinan pemecahan masalah berkenaan dengan topic yang sedang diteliti. Ciri-ciri hipotesis yang baik adalah jelas, menyatakan dugaan hubungan antar variable, dapat diuji secara empiris, konsisten dengan pengetahuan yang ada, dinyatakan sesederhana dan sesingkat mungkin.

Hipotesis statistic dinyatakan dalam bentuk hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternative. Hipotesis nol menyatakan tidak ada perbedaan atau hubungan antar variable, dan sebaliknya. Dalam uji statistic yang diuji adalah H_0 , jika H_0 ditolak maka H_a diterima. Hipotesis alternative biasanya sesuai dengan hipotesis penelitian. Jika hipotesis ditolak bukan berarti gagal tetapi disebabkan, antara lain: landasan teori kurang tepat, sampel kurang representative, instrumen kurang valid dan reliabel, rancangan penelitian kurang tepat, salah hitung, kurang tepat memilih variable, dan ada variable lain yang lepas dari perhatian peneliti.

Oleh karena itu hipotesis penelitian ini dikonstruksi dengan kalimat terdapat pengaruh Pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 terhadap Kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.

Sehubungan dengan itu, berikut diuraikan bahwa

$H_0: \beta \leq 0$, tidak ada pengaruh signifikan dan positif antara Persepsi Partai Politik

Peserta Pemilik ada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 terhadap

Kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi

$H_0: \geq 0$, ada pengaruh signifikan dan positif antara Persepsi Partai Politik Peserta

Pemilikada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 terhadap Kinerja

Panwaslu Kabupaten Banyuwangi

Level signifikan $\alpha = 0,05$, dan $t \text{ tabel} = (\alpha, n - k - 1)$

Menentukan kriteria pengujian

- H_0 diterima (tidak signifikan) apabila $t \text{ hitung} < t \text{ tabel}$ dan signifikan $\geq 0,05$ -

H_a ditolak (signifikan) apabila $t \text{ hitung} > t \text{ tabel}$ dan signifikan $\leq 0,05$

a) Variabel Bebas (Independent Variable)

Variabel bebas yang disebut juga variabel independen / variabel predictor merupakan variabel stimulus atau variabel yang menerangkan / kadang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel yang variabelitasnya diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

Penelitian ini meliputi variable bebas sebagai berikut :

a) Struktur organisasi, (X_1) diukur dengan indicator sebagai berikut:

1) Indikator Akuntabilitas ($X_{1.1}$), dapat dilihat dari:

a) Mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten Banyuwangi

($X_{1.1}$) yang meliputi:

1. Pemutakhiran dari pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap
2. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah kabupaten/kota
3. Penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah

kabupaten/kota

4. Pelaksanaankampanye
 5. Perlengkapan pemilu danpendistribusiannya
 6. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasilpemilu
 7. Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungansuara
 8. Pergerakan surat suara dari tingkat TPS sampai kePPK
 9. Proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU kabupaten Banyuwangi dari seluruhkecamatan
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang , Pemilu lanjutan dan pemilususulan
 11. Proses penetapan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten
- b) Indikator Responsibilitas ($X_{1.2}$), dapat dilihat dari Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Banyuwangi Melaksanakan:
1. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undang mengenai pemilu
 2. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsure tindak pidana
 3. Menyampaikan temuan dan laporan KPU Kabupaten / Kota untuk tindak lanjut
 4. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya kepada instansi yang berwenang
- c) Indicator Responsivitas ($X_{1.3}$), dapat dilihat dari:
- 1) Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan tergantungnya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota

- 2) Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota , sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten / Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung
 - 3) Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan pemilihan
 - 4) Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh undang-undang.
 - 5) Tingkat pendelegasian wewenang yang ada dalam organisasi
 - 6) Tingkat pemanfaatan pegawai yang sesuai dengan spesialisasi
 - 7) Tingkat pengendalian pegawai dalam pelaksanaan tugas
- b) Sumber daya manusia (X_2) , diukur dengan indikator sebagai berikut:
- 1) Tingkat ketersediaan pegawai baik secara kuantitas dan kualitas
 - 2) Tingkat pendidikan yang dimiliki
 - 3) Tingkat kemampuan teknis yang dimiliki pegawai
- c) Finansial, (X_3) diukur dengan indikator sebagai berikut
- 1) Tingkat pengalokasian anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
 - 2) Tingkat ketersediaan anggaran biaya operasional untuk kegiatan pembinaan terhadap pegawai dan masyarakat

b) Variabel Tergantung (Dependent Variable)

Variabel tergantung yang disebut juga sebagai variabel dependen / variabel yang diterangkan / variabel yang memberi respon adalah variabel yang memberikan reaksi / respon jika dihubungkan dengan variabel bebas. Variabel tergantung adalah

variabel yang variabelitasnya diamati dan diukur untuk menentukan besar kecilnya pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.

Variabel tergantung meliputi sebagai berikut :

- a) Stimulus atau Rangsangan Partai Politik terhadap Kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi;
- b) Registrasi. Yakni proses Partai Politik dapat mendengarkan atau melihat informasi yang terkirim kepadanya, kemudian mendaftarkan semua informasi tentang Kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.
- c) Interpretasi yaitu Proses interpretasi Partai Politik tentang Kinerja Panwaslu Kabupaten Banyuwangi.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi menurut merupakan keseluruhan obyek yang menjadi bahan penelitian, Sedangkan sampel adalah bagian kecil dari suatu populasi yang karakteristiknya hendak diselidiki dan dianggap dapat mewakili dari keseluruhan populasi (Djarwanto Ps, dkk, 1993).

a) Populasi

Topik penelitian ini, adalah Kinerja Panwaslu terhadap Persepsi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi tahun 2010, maka focus penelitian adalah partai politik peserta pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Banyuwangi tahun 2010.

Berdasarkan data Banyuwangi dalam angka Tahun 2010, maka Partai di wilayah Kabupaten Banyuwangi terdapat 10 (sepuluh) partai, yakni PDI-P, Partai Demokrat, Partai Golkar, PKB, PKNU, Partai Gerindra, Partai Hanura, PPP, PAN dan Partai Republikan. Dalam hal pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Banyuwangi Kesepuluh partai tersebut dapat mengajukan calon, jika memenuhi syarat ketentuan sebagaimana Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010.

H. Abdullah Azwar Anas M.Si sebagai bakal calon kepala daerah bersama Yusuf Widyatmoko, S.Sos sebagai bakal calon wakil Kepala daerah. Pasangan ini didukung oleh 3 (tiga) partai politik dengan jumlah perolehan suara sah ketiga parpol pada pemilu legislative tahun 2009 sebesar 34,34 % ketiga partai politik terdiri dari Partai Demokrasi Indonesia – Perjuangan sebesar 20,82%. Dan 12 kursi, Partai Keadilan Sejahtera sebesar 2,94 % dan 0 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 10,58 % dan 6 kursi.

Kemudian Emilia Contessa sebagai calon kepala daerah bersama H.A Dainuri sebagai bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Delapan partai mendukung dengan jumlah perolehan suara sah kedelapan parpol pada pemilu legislative 2009 sebesar 17,65 persen dan total jumlah perolehan kursi 9 kursi. Kedelapan partai tersebut terdiri dari Partai Amanat Nasional 13,76 % dan 1 kursi, Partai Barisan Nasional 1,12 % dan 0 kursi, Partai Demokrasi Pembaharuan 2,48 % dan 0 kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya 6,24 % dan 0 kursi dan Partai Karya Peduli Bangsa 1,55 % dan 0 kursi, Partai Nasional Marhaenisme 0,28 % dan 0 kursi, Partai Patriot 0,74 % dan 0 kursi, Partai Republikan Nusantara 1,49 % dan 1 kursi.

Ir. H. Jalal sebagai bakal calon kepala Daerah bersama Yusuf Nuris, SH,MH sebagai calon wakil kepala daerah dengan didukung oleh satu partai yaitu Partai Demokrat dengan prosentase perolehan suara sah pada Pemilu legislative 2009 sebesar 16,06 % dan 10 kursi. Dr. Mulyono sebagai bakal calon kepala daerah bersama Ir. Untung Harjito sebagai bakal calon wakil kepala daerah didukung oleh tiga partai politik dengan prosentase perolehan suara pada Pemilu legislative 2009 sebesar 14,46 % dan total perolehan kursi 2 kursi.

Memperhatikan hal itu, maka populasi penelitian adalah partai politik yang dalam Pemilu legislative 2009 mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi, yaitu

No	Partai Politik	Jumlah Kursi	Persentase
1	PDI P	12	24 %
2	Partai Demokrat	10	20 %
3	Golkar	7	14 %
4	PKB	6	12 %
5	PKNU	5	10 %
6	Partai Gerindra	4	8 %
7	Partai Hanura	2	4 %
8	PPP	2	4 %
9	PAN	1	2 %
10	Partai Republikan Nusantara	1	2 %
		50	100%

Basnyuwangi dalam Angka Tahun 2010

Jika ditelaah dari jumlah DPT Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 adalah 1,233,883 dengan asumsi bahwa para pemilih menggunakan hak politik secara benar, maka populasi dalam penelitian adalah anggota Partai Politik yang menggunakan hak pilih dalam Pemilu legislative Tahun 2009.

b) Sampel

Populasi penelitian meliputi 1.233.883 orang yang secara representative diwakili oleh 10 partai yang duduk dalam DPRD Kabupaten Banyuwangi, maka sampel penelitian dilakukan berdasarkan perhitungan sebagai berikut, Populasi penelitian meliputi berdasarkan hak pilih pada Pemilu legislative 2009 di Kabupaten Banyuwangi sejumlah 1.233.883 orang , sementara jumlah kursi DPRD Kabupaten Banyuwangi sejumlah 10 kursi, maka harga kursi di DPRD Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut :

Jumlah pemilih = 1.233.883 orang

Jumlah kursi DPRD = 50 kursi

Maka nilai kursi DPRD = $\frac{1.233.883 \text{ orang}}{50 \text{ kursi}} = 24.677,66 \text{ suara}$

$$N = \frac{4 p q}{d^2} = \frac{4 (p) (p-1)}{d^2}$$

$$N = \frac{4 p q}{d^2}$$

$$N = \frac{4 (24677,66) (24676,66)}{(0,05)^2}$$

$$N = 48,7169780$$

Menurut Sugiyono pada perhitungan yang menghasilkan pecahan (terdapat koma) sebaiknya dibulatkan keatas.

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan jumlah sampel adalah 49 orang yang masing-masing berkedudukan dalam partai politik.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh data yang relevan, dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penyusunan penelitian ini penulis memperoleh data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari instansi atau pihak-pihak terkait yaitu, data diperoleh dengan memberikan kuesioner yang bersifat tertutup dan menggunakan skalalickert.

1) Teknik pengumpulan data merupakan cara-cara yang dilakukan untuk memperoleh data dan keterangan-keterangan yang diperlukan dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian lapangan merupakan cara untuk memperoleh data primer yang secara langsung melibatkan pihak responden yang dijadikan sampel dalam penelitian. Metode penelitian lapangan ini dapat dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara yaitu proses memperoleh data untuk tujuan penelitian dengan melakukan tanya jawab (berupa kuesioner) dengan pihak-pihak terkait seperti karyawan perusahaan yang bersangkutan sehubungan dengan permasalahan yang dihadapi.

b. Kuesioner

Kuesioner yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden dengan sampel

penelitian untuk kemudian di jawab.

c. Observasi

Melakukan observasi langsung terhadap kegiatan pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pemilu seperti partai politik, DPRD, badan kesatuan bangsa dan politik, KPU Kabupaten Banyuwangi dan pihak-pihak lain seperti calon Bupati dan Wakil Bupati dan pihak lain yang terkait sampel yang diteliti untuk mendukung hasil wawancara yang penulis lakukan

2) Penelitian Kepustakaan (*LibraryResearch*)

Penelitian kepustakaan dilakukan sebagai usaha guna memperoleh data yang bersifat teori sebagai pembanding dengan data yang diperoleh. Teknik ini dilakukan baik secara *library research* maupun *internet research* untuk menambah wawasan dan informasi tentang masalah yang dikaji dengan maksud memperoleh data-data pendukung yang berfungsi sebagai referensi-referensi yang berkaitan dengan penelitian ini. Dalam hal ini, peneliti menggunakan buku yang berkaitan dengan proses demokratisasi, otonomi daerah, metodologi penelitian dan peneliti juga menggunakan media internet sebagai penelusuran informasi mengenai teori maupun data-data penelitian yang dilakukan.

3.5 Analisis Data dan Rancangan Pengujian Hipotesis

3.5.1 Analisis Data

Analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca, dipahami dan diinterpretasikan. Data yang dianalisis merupakan data hasil penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan, kemudian peneliti melakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, maka digunakan metode statistik yang merupakan metode analisis data yang efektif dan efisien dalam suatu penelitian. Metode statistik yang digunakan adalah metode yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

Adapun cara untuk menilai variabel *independen* (X) dan variabel *dependen* (Y) maka analisis akan dilakukan dengan menghitung nilai rata-rata atau *mean* dari setiap variabel. Nilai rata-rata ini didapat dengan cara menjumlahkan data keseluruhan dalam setiap variabel kemudian dibagi dengan jumlah responden.

Menurut Sugiyono (2010:42) untuk menghitung rata-rata masing-masing variabel dapat menggunakan rumus sebagai berikut :

Untuk Pelaksanaan Pemilikada Kabupaten Banyuwangi Tahun 2010 variabel (X) rumusnya adalah :

$$ME = \frac{n}{\sum x_1}$$

Dimana :

Me = Mean (Rata – rata)

Σ = Jumlah (Sigma)

x_1 = Nilai Y ke 1 sampai ke n

n = Jumlah responden

Teknik menggunakan *mean* ini merupakan salah satu teknik penjelasan kelompok yang didasarkan atas nilai rata-rata dari kelompok tersebut. Rata-rata ini didapat dengan

menjumlahkan data seluruh individu yang ada pada kelompok tersebut kemudian dibagi dengan jumlah individu yang ada pada kelompok tersebut. Setelah hasil rata-rata itu didapat, maka akan dibandingkan sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan oleh penulis berdasarkan nilai terendah dan nilai tertinggi dari hasil kuesioner. Nilai terendah dan nilai tertinggi tersebut diambil dari banyaknya pernyataan dalam kuesioner dikalikan dengan skor terendah yaitu 1 (satu) dan yang tertinggi yaitu 5 (lima).

Dalam penelitian ini skor untuk setiap jawaban dari pernyataan yang akan diajukan kepada responden akan mengacu pada pernyataan Sugiyono (2010 : 133) yaitu dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel, kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item - item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan.

Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, misalnya :

- a. Setuju/selalu/sangat positif diberi skor5
- b. Setuju/sering/positif diberi skor4
- c. Ragu – ragu/kadang – kadang/ netral diberi skor3
- d. Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif diberi skor2
- e. Sangat tidak setuju/tidak pernah diberi skor1

Dengan menggunakan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator – indikator variabel. Akhirnya indikator – indikator yang terukur ini dapat dijadikan titik tolak untuk membuat item atau instrumen yang berupa pernyataan atau pertanyaan yang perlu dijawab oleh responden.

3.5.3 Analisis StatistikDeskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian pada dasarnya merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Indriantoro dan Supomo, 2002: 170). Statistik deskriptif umumnya digunakanoleh

peneliti untuk memberikan informasi mengenai karakteristik variabel penelitian yang utama. Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral, disperse dan koefisien antar variabel penelitian.

3.5.4 Uji Instrumen Data

a. Uji Validitas Data

Validitas adalah ketepatan atau kecermatan suatu instrument dalam mengukur apa yang ingin di ukur (Priyatno, 2008:16). Uji validitas sebuah data bertujuan untuk mengetahui sejauh mana validitas data yang diperoleh dari penyebaran kuesioner. Uji validitas adalah esens kebenaran penelitian. Sebuah *instrument* dikatakan valid apabila mampu, mengukur apa yang hendak diukur serta dapat mengungkapkan data dan variabel yang akan diteliti secara tepat. Kriteria validitas yang dilakukan dengan analisis faktor (*Confirmatory Factor Analysis*) adalah valid jika nilai KMO > 0,5 dan *Barlett's Test* dengan signifikansi < 0,05 (Ghozali, 2002:47).

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjuk pada suatu pengertian bahwa suatu instrument cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Sebuah instrumen harus reliabel, dalam arti bahwa instrument tersebut cukup baik sehingga mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Arikunto, 2006:169).

Uji reliabilitas dengan menggunakan metode *Alpha Cronbach's*, suatu instrument dikatakan reliabel apabila nilai alpha lebih besar dari 0,06 (Ghozali, 2002:42), dengan rumus:

$$\alpha = \frac{(K)Cov/Var}{1 + (K - 1)Cov/Var}$$

Dimana :

α = alpha

K = jumlah butir dalam skala

Cov = rerata kovarians diantarabutir

Var = rerata varians daributir

Setelah menilai alpha, selanjutnya membandingkan nilai tersebut dengan angka kritis reliabilitas. Instrumen yang dipakai dalam variabel diketahui handal (*reliabel*) apabila memiliki *Cronbach Alpha* $>0,60$ (Ghozali, 2002:42).

3.5.4 Uji Normalitas Data

Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas yang dilakukan terhadap sampel dilakukan dengan menggunakan *kolmogorov-smirnov test* dengan menetapkan derajat keyakinan (α) sebesar 5%. Uji dilakukan pada setiap variabel dengan ketentuan bahwa jika secara individual masing-masing variabel memenuhi asumsi normalitas, maka secara simultan variabel-variabel tersebut juga bisa dinyatakan memenuhi asumsi normalitas (Santoso, 2004:212). Kriteria pengujian dengan melihat besaran *kolmogorov-smirnov test* adalah sebagai berikut:

- a. Angka signifikansi (Sig.) $> 0,05$, maka data berdistribusi normal
- b. Angka signifikansi (Sig.) $< 0,05$, maka data tidak berdistribusi normal

3.5.5 Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Model

Uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah variabel pengganggu atau residual dalam model regresi memiliki distribusi normal. Normalitas suatu data dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data (titik) pada sumbu diagonal dari grafik *Normal P-Plot of Regression Standardized Residual*. Dengan metode ini, data dapat mengikuti arah garis diagonal dari grafik *Normal P-Plot Regression Standardized Residual* (Santoso, 2002:99).

b. Uji Multikolinearitas

Uji ini bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Dikatakan bebas apabila (VIF) tidak lebih dari 10 dan nilai Toleransi tidak kurang dari 0,1 (Ghozali, 2006: 105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Dalam penelitian ini heteroskedastisitas dideteksi dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Heteroskedastisitas menunjukkan varians dari residual yang tidak sama dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Santoso, 2002: 95). Dengan metode ini, suatu regresi dapat dikatakan terbebas dari masalah heteroskedastisitas apabila:

- 1) Titik-titik (point-point yang ada tidak membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang, menyebar dan menyempit).
- 2) Titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 (nol) pada sumbu.

3.5.6 Analisis Regresi Berganda

Analisis yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, karena terdapat lebih dari satu variabel bebas. Agar dapat mengetahui intensitas hubungan antara variabel terikat dengan variabel bebas, model regresi yang digunakan dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = b_0 + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + e$$

Dimana:

Y = variabel dependen

X₁ X₂ X₃ X₄ = variabel independen

X₁ = Struktur organisasi

X₂ = sumber daya manusia

X₃ = finansial

b₀ = *intercept*

b₁ b₂ b₃ b₄ = koefisien regresi variabel independen

e = variabel pengganggu

3.6.7 Koefisien Determinasi (R^2)

Menurut Sugiyono (2008:68) mengatakan bahwa nilai koefisien determinasi berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas yang diteliti terhadap variasi variabel terikat. Bila koefisien determinasi berganda (R^2) mendekati angka satu maka dapat dikatakan bahwa sumbangan dari variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Hal ini berarti model yang digunakan semakin kuat untuk menerangkan variasi variabel terikat.

Koefisien determinasi berganda (R^2) dapat menurun bila suatu variabel baru ditambahkan pada model regresi (sekali pun R^2 meningkat). Akan tetapi kenaikan R^2 tidak berarti bahwa variabel baru yang dimasukkan secara statistik signifikan.

$$AdjustR^2 = \frac{1 - (n - 1)}{(n - k) \times (1 - R^2)}$$

Keterangan:

R^2 = Koefisien penentuan berganda

n = Banyaknya responden

k = Banyaknya variabel bebas

3.6.8 Ujit

Pengujian secara parsial (uji-t) yaitu pengujian koefisien regresi secara individu dengan menentukan formula statistik yang akan diuji, uji t sebagai uji masing-masing variabel dari suatu persamaan regresi berdasarkan nilai t_{hitung} (Sugiyono, 2008:68), diperoleh dari:

$$t = \frac{b}{Se}$$

Keterangan:

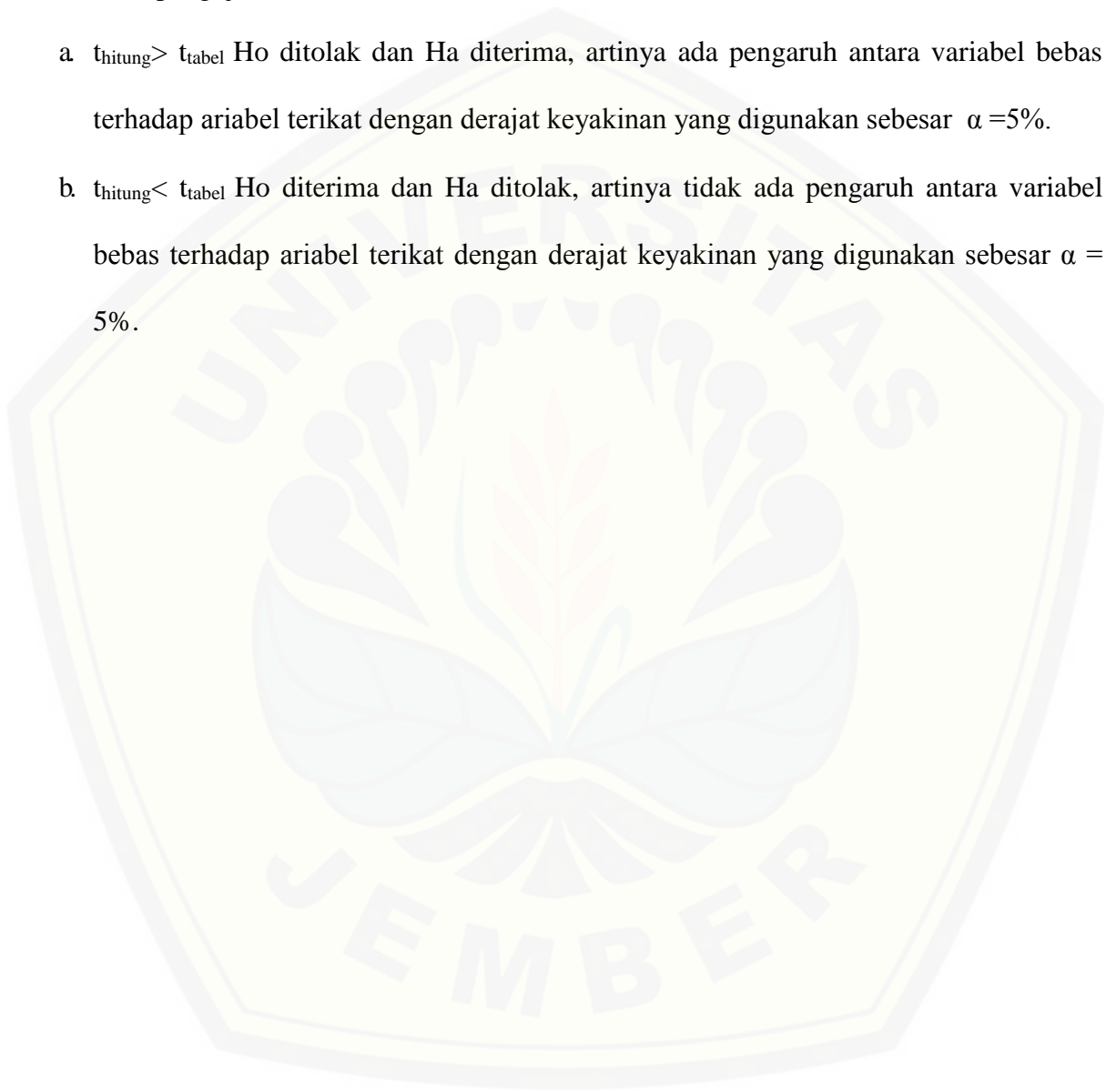
b = Parameter estimasi

Se = Standar error

Tingkat signifikansi (α) 5% dari $df = n-k-1$ diperoleh nilai t_{tabel} , kemudian nilai t_{tabel} dibandingkan dengan nilai t_{hitung} yang diperoleh dengan membandingkan kedua nilai t tersebut, maka akan diketahui pengaruhnya yaitu dapat diterima atau ditolaknya hipotesis.

Kriteria pengujian:

- a. $t_{hitung} > t_{tabel}$ H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha = 5\%$.
- b. $t_{hitung} < t_{tabel}$ H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya tidak ada pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan derajat keyakinan yang digunakan sebesar $\alpha = 5\%$.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut.

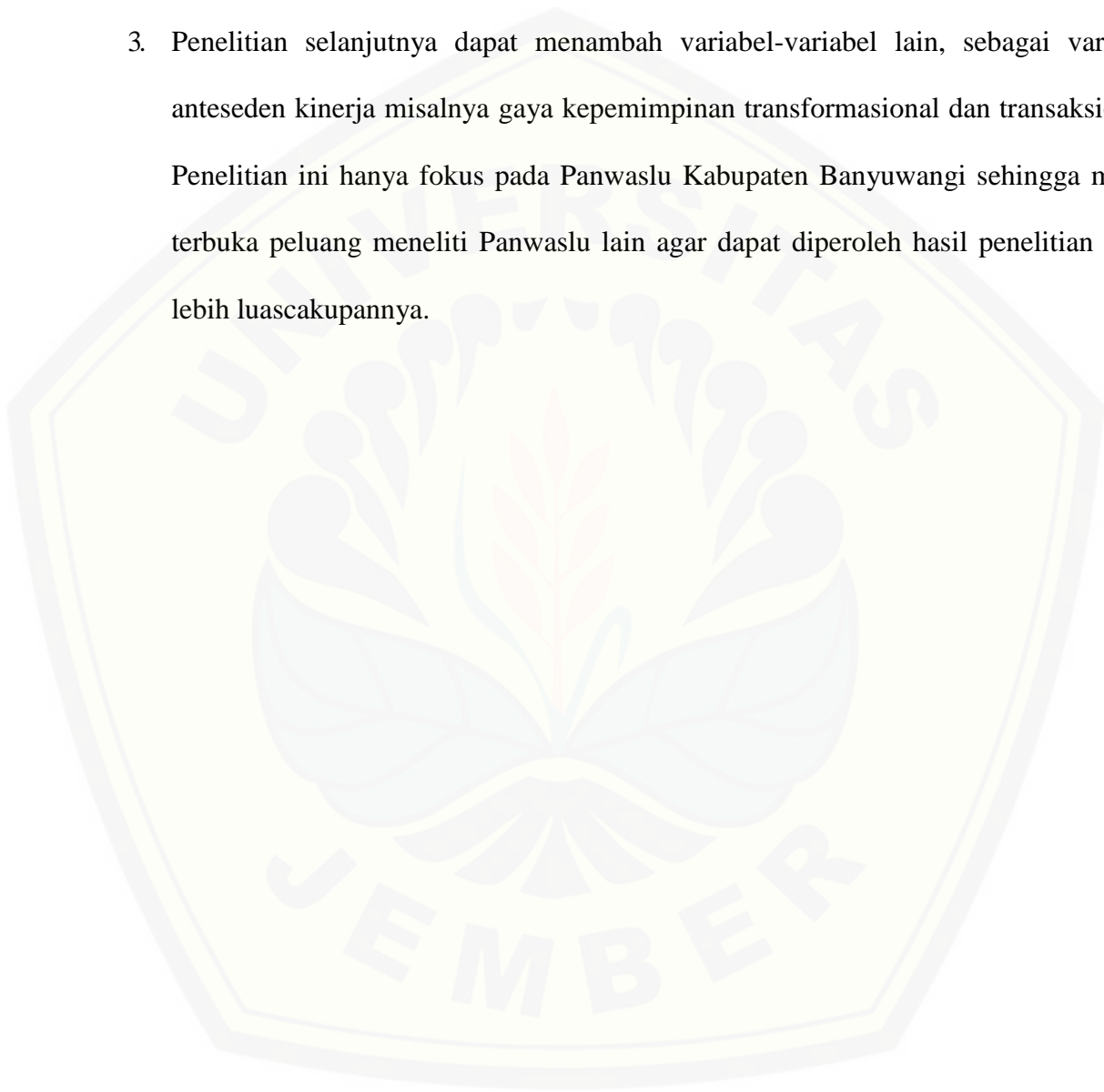
- a. Pengaruh variabel struktur organisasi terhadap kinerja Panwaslu diperoleh nilai beta (β) sebesar 0,451 dengan ρ -value sebesar 0,000. Karena nilai ρ -value lebih kecil daripada α ($0,047 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian Persepsi Partai politik menyatakan ada pengaruh signifikan struktur organisasi terhadap kinerja Panwaslu.
- b. Pengaruh variabel Sumber daya manusia terhadap kinerja Panwaslu diperoleh nilai beta (β) sebesar 0,131 dengan ρ -value sebesar 0,000. Karena nilai ρ -value lebih kecil daripada α ($0,048 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian Persepsi Partai politik menegaskan ada pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kinerja Panwaslu.
- c. Finansial terbukti berpengaruh signifikan terhadap kinerja Panwaslu kerja. Hal ini didasarkan pada hasil pengujian hipotesis. pengujian variabel finansial terhadap kinerja Panwaslu diperoleh nilai beta (β) sebesar 0,325 dengan ρ -value sebesar 0,000. Karena nilai ρ -value lebih kecil daripada α ($0,037 < 0,05$) maka H_0 ditolak. Dengan demikian Persepsi Partai politik menegaskan ada pengaruh signifikan sumber daya manusia terhadap kinerja Panwaslu.

4.2 Saran

Saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Dalam kesimpulan disebutkan bahwa terdapat pengaruh variabel Sumber daya manusia terhadap kinerja Panwaslu, terutama dalam tahapan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu, maka untuk meningkatkan pengaruh sumberdaya maka diperlukan petugas di tingkat TPS untuk mengawasi pelaksanaan tahapantersebut.

2. Penelitian selanjutnya dapat mengukur variabel dengan persepsi yang lain, terutama persepsi atasan (supervisor atau manager), dengan tujuan untuk mengukur dan mengidentifikasi kecenderungan kinerja Panwaslu untuk perbaikan manajemen selanjutnya.
3. Penelitian selanjutnya dapat menambah variabel-variabel lain, sebagai variabel antecedent kinerja misalnya gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional. Penelitian ini hanya fokus pada Panwaslu Kabupaten Banyuwangi sehingga masih terbuka peluang meneliti Panwaslu lain agar dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih luascakupannya.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Muhammad .2005. “*Persepsi Tokoh-Tokoh Masyarakat Jombang Terhadap Kiprah Kiai Dalam Politik*”, Skripsi: Syariah IAIN Sunan Ampel,
- Agus Dwiyanto, 2006, *Mewujudkan Good Governance Melayani Publik*, Gadjah Mada University, Yogyakarta
- Ariwibowo dan Asral Muhammad, *Model-Model Sistem Pemilihan di Indonesia*, Pusat Studi Demokrasi dan HAM, bekerja sama dengan Patternship for governancein Indonesia
- Aribowo. 2003. *Partai Politik, UU Kepartaian Dan Implikasinya Bagi Daerah*, Makalah disampaikan dalam Pelatihan Penyiapan Stakeholders Pemilu Di Daerah Dalam Implementasi UU Partai Politik Dan Pemilu 2004.
- Ancok, Djamaluddin, 2002, *Outbound Management Training: Aplikasi Ilmu Perilaku Dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia*, MI Press, Yogyakarta.
- Atmosudirdjo, Prajudi. 1999. *Teori Organisasi*. Jakarta: STIA-Lembaga Administrasi Negara Press. Siagian, Sondang P. 2004. *Teori Pengembangan Organisasi*. Jakarta: Bumi Aksara. Dwiyanto, Agus, et.al. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Bernardin, H. John. 2003. *Human Resources Management: An Experiential Approach*, 3rd edition, McGraw-Hill/Irwin, New York
- Bryson, John. M. 2007. *Perencanaan Strategis bagi Organisasi Sosial*.Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Buchari, Zainun. 2000. *Manajemen dan Motivasi*. Jakarta: Balai Aksara.
- Byars, Lloyd L dan Rue, Leslie W. 2006. *Human Resource Management*, 8 edition. MCGraw-Hill, Irwin
- David, Fred R. 2006. *Manajemen Strategi*. Buku 1, Edisi kesepuluh. Jakarta : Salemba Empat
- Darden, W.R., Hampton, R., & Howell, R.D. 1989, *Career versus Organizational Commitment: Antecedents and Consequences of Retail Salespeoples’ Commitment*, *Journal of Retailing*, 65, 80-106
- Djarwanto Ps dan Pangestu, Subagyo.1996.*Statistik Induktif* Edisi Empat. Yogyakarta: Badan Percetakan Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada.
- Edwin B. Fillipo. 1988. *Manajemen Personalialia*. Edisi 6, Jilid 1. Erlangga.
- Effendy, Onong Uchjana. 2002. *Komunikasi Teori dan Praktek*.Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Etzioni, Halevy Eva. *Demokrasi Dan Birokrasi Sebuah Dilema Politik*

- Faisal Sanapsiah, 1990. *Penelitian Kualitatif : dasar-dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih, Asah., Asuh, Malang,
- Fitria, Asril., 2005, *Pemilukada Langsung dan Masa Depan Demokrasi*, Averroes Press, Malang
- George dan Jones, 2005, *Understanding and Managing Organizational Behavior 4th Edition*, Pearson Prentice Hall
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Goggin, Malcolm L et al. 1990. *Implementation, Theory and Practice: Toward a Third Generation*, Scott, Foresmann and Company, USA
- Gomes, Faustino Cardoso, 2003, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Hasibuan, Malayu S. P. 2006, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Edisi Revisi : Jakarta. Bumi Aksara
- Higgins, 1998, *Hubungan antara Kepemimpinan dengan Iklim Organisasi dan Kepuasan Kerja*, Terjemahan Abdul Rasyid dan Ramelan, PPM, Jakarta.
- Jallaluddin Rahmad, 1999. *Psikologi Komunikasi*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, (edisi Revisi)
- Joedono,SB.1974.*Administrasi Pembangunan : Sebuah Pengantar*.Jakarta : Prisma.
- J. Salusu. 2006. *Pengambilan Keputusan Strategik Untuk Organisasi Publik dan Organisasi Non Profit*.Grasindo. Jakarta
- Kaho, Josef riwu.1988. *Prospek Otonomi di Negara Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kusumaatmaja, Mochtar, 1998 *,Fungsi Dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bina Cipta, Jakarta.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. 2000. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah: *Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Istitut Pemerintah*. Lembaga Administrasi Negar (LAN) RI.
- Mardiasmo., 2009, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: ANDI.
- Marijan, Kacung,2010. *Sistem Politik Indonesia: Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru* Penerbit: Kencana Prenada Media (Cetakan Ketiga)
- Milton J. Esman. 1986. *Unsur Unsur Dari Pembangunan Lembaga*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesi
- Moh.Nazir.Ph.D, 2005, *Metode Penelitian*.Ghalia Indonesia. Bogor.

- Miriam Budihardjo, 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Edisi Revisi), Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
- Muljarto Rjokrowinoto. 1999. *Pembangunan :Dilema dan Tantangan*. Pustaka Pelajar Offset. Yogyakarta
- Muchtar, T. 1998. *Hubungan Karakteristik Elit Formal dan Elit Informal Desa dengan Persepsi dan Tingkat Partisipasi Mereka dalam Program P3DT di Kabupaten Sukabumi*. Tesis. Program Pascasarjana. Institut Pertanian Bogor
- Numberi, Fredy. 2000. *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Makalah.
- Polly, Lisa M. 2002, *Social Exchange and Customer Service: The Relationship Between Perceived Organizational Support, Leader-Member Exchange, and Customer Service Behavior*, *Dissertation*, Louisiana State University,
- Ritonga, Abdurrahman dkk. 2003. *Kependudukan dan Lingkungan Hidup*, Cetakan Kedua. Jakarta : Lembaga penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Sarwono, Sarlito W. 2009. *Pengantar Psikologi Umum*. Depok: Rajawali Pers.
- Santoso, Singgih, 2003. *Statistuk Deskriptif, Konsep Apilkasi dengan Microshof Excel dan SPSS*, Yogyakarta. Penerbit Andi.
- Santoso, Singgih. *Mengatasi Masalah Statistik dengan SPSS Versi 11,5* Jakarta. Gramedia.
- Siagian, Sondang P. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. PT Bumi Aksara: Jakarta
- Simamora, Henry, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi kedua*, Cetakan kedua, Penerbit STIE YKPN, Yogyakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Jakarta : Rineka Cipta
- Soerjadi, PS, 2000. *Model Sumber Daya Manusia Indonesia, Asia dan Timur Jauh*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Steers, Richrd M. 1985. *Efektivitas Organisasi*, Cetakan Kedua, Alih Bahasa Magdalena Jamin, Erlangga, Jakarta.
- Steers, R. M. 2003. *Organization Effectiveness, A Behavioral View*, Good Year Publishing Company, diterjemahkan oleh Magdalena Jamin. 1980. Jakarta :Erlangga
- Sugiono ,2010, “*Memahami Penelitian Kualitatif*”, Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono ,2006, “*Metode Penelitian Administrasi*”, Alfabeta, Bandung.
- Suwoto, Mulyosudanno, 1997. *Peralihan Kekuasaan, Kajian Teoritis dan Yuridis Terhadap Pidato Nawaskara*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Syamsuddin Haris, Firman Noor, Tri Rainny Syafarani , *Evaluasi Pemilu Legislatif 2009: Tinjauan atas Proses Pemilu, Strategi Kampanye, Perilaku Memilih dan Konstelasi Politik Hasil Pemilu* (LIPI Press), 2009. Jakarta

Toha, Miftah, 2010. *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, Jakarta : Rajawali Pers.

Yeremias T Keban. 2004. *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konep, Teori, dan Isu*. Yogyakarta: Gava Media.

Undang-Undang

. Undang-Undang Dasar 1945

UU Nomor 22 tahun 1999 tentang *pemerintahan daerah*

UU Nomor 32 tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*

UU Nomor 12 tahun 2008 tentang *Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*

UU No. 22 Tahun 2007 tentang *Penyelenggara Pemilihan Umum*

UU No 02 Tahun 2008 tentang *Partai Politik*

Peraturan

Peraturan Bawaslu Nomer 1 Tahun 2010 tentang *Tata Cara Pengangkatan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan*

Peraturan Bawaslu Nomer 18 Tahun 2009 tentang *Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Peraturan Bawaslu Nomer 30 Tahun 2009 tentang *Susunan Organisasi dan Tata Kerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;*

Peraturan Bawaslu Nomer 14 Tahun 2009 tentang *Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum;*

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang *Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Peraturan KPU Nomer 13 tahun 2010 tentang *Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 68 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah*

Artikel

Detik News : 14 juni 2010

BAWASLU,juli 2010

KOMPAS, 19 juli 2010

Surat

Surat Rekomendasi Nomor 433/Bawaslu/VI/2010 tertanggal 28 Juni 2010

